Muhammad Adil, Duski, Syahril Jamil

Kerukunan ANTAR UMAT BERAGAMA

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan

SYARIAH
IAIN RADEN FATAH PRESS

UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG

KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 dan 8 Tahun 2006
di Ogan Komering Ulu Timur
Sumatera Selatan

Laporan Penelitian

Tim Peneliti:
Muhammad Adil, Duski, Syahril Jamil

KERJASAMA:
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA
JAKARTA
FAKULTAS SYARIAH IAIN RADEN FATAH
PALEMBANG
TAHUN 2012

Kutipan Pasal 44 Ayat (1) dan (2) Undang, undang Republik Indonesia tentang HAK CIPTA

Tentang Sanksi Pelanggaran Undang, undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA sebagaimana telah diubah dengan Undang, undang Nomor 7 Tahun 1987 jo. Undang, undang Nomor 12 Tahun 1997, bahwa:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau menyebarkan suatu ciptaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing, masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), atau pidana pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dngan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

NOMOR: IN/4/1.1/KP.00.9/333/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI PROGRAM PENELITIAN MITRA BALAI PENELTIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA JAKARTA DENGAN FAKULTAS SYARIAH IAIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2012

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN RADEN FATAH PALEMBANG

MENIMBANG :

1. Surat dari Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta Februari 2012
2. Bahwa untuk menyelenggarakan Program Penelitian Mitra Balai Penelitian dan Pengembangan Agama dengan Fakultas Syariah IAIN RAden Fatah Tahun 2012 perlu dibentuk sebuah Tim Peneliti
3. Bahwa saudara-saudara yang tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan Program Penelitian Mitra Balai Penelitian dan Pengembangan Agama dengan Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Tahun 2012

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP Nomor 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Agama RI nomor 31 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Raden Fatah Palembang
4. UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama
5. Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 & 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

MEMPERHATIKAN : Pemberitahuan dari Balai Penelitian dan Pengambangan Agama Jakarta bulan Februari 2012

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

Pertama : Bahwa penelitian kemitraan ini akan dimulai sejak bulan Maret dan akan berakhir pada bulan Juli 2012

Kedua : Menunjuk Tim Peneliti dari Faklultas Syariah IAIN Raden Fatah:

1. Prof. Dr. Duski, M.Ag.
2. Dr. Muhammad Adil, MA
3. Syahril Jamil, M.Ag.

Ketiga : Pendanaan Tim Peneliti berasal dari DIPA Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Keempat : Tim Peneliti harus melaporkan kegiatannya, jika prosesnya teleh selesai dilaksanakan

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIDTETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 13 MARET 2012

PROF. DR. DUSKI, M.Ag
NIP196306131995031001

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK)
PENELITIAN MITRA DENGAN PERGURUAN TINGGI
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA JAKARTA
TAHUN 2012

KODE	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
Seminar Proposal/Pra Penelitian (Tahap I)				**34.700.000**
521213	**Honor peneliti** (3 Org x 30 Hr x 4 Jm)	360 OHJ	40.000	14.400.000
521211	**Bahan:**			
	ATK	1 Keg	975.000	975.000
	Foto copy makalah	1 Keg	300.000	300.000
	Spanduk	1 Bh	350.000	350.000
	Sertifikat	25 Org	15.000	375.000
	Dokumentasi		275.000	275.000
	Seminar Kit	25 Org	130.000	3.250.000
522151	**Jasa Profesi:**			
	Honor Moderator (1 Or x 2 Jm)	2 OJ	300.000	600.000
	Honor Narasumber, Penyaji Makalah (1 Or x 2 Jm)	2 OJ	450.000	900.000
*)	Honor Narasumber, Pembahas (1 Org x 2 Jm)	2 Oj	450.000	900.000
	Honor Narasumber, Pembahas (1 Or x 2 Jm)	2 OJ	500.000	1.000.000
521219	**Belanja Barang Non Operasional Lainnya:**			
	Paket Full Day (25 Org x 1 Hr)	25 OH	275.000	6.875.000
	Uang Saku (25 Org x 1 Hr)	25 OH	70.000	1.750.000
	Transport Peserta (25 Org x 1 Hr)	25 OH	110.000	2.750.000
Seminar Hasil Penelitian (Tahap II)				**38.910.000**
521213	**Honor peneliti** (3 Org x 29 Hr x 4 Jm)	348 OHJ	40.000	13.920.000
	Pengolahan Data	1 Paket	1.540.000	1.540.000
521211	**Bahan:**			
	ATK	1 Keg	975.000	975.000
	Foto copy makalah	1 Keg	450.000	450.000
	Spanduk	1 Bh	350.000	350.000
	Sertifikat	30 Org	15.000	450.000
	Dokumentasi		275.000	275.000
	Seminar Kit	30 Org	130.000	3.900.000
522151	**Jasa Profesi:**			
	Honor Moderator (1 Or x 2 Jm)	2 OJ	300.000	600.000
	Honor Narasumber, Penyaji Makalah (1 Or x 2 Jm)	2 OJ	450.000	900.000
*)	Honor Narasumber, Pembahas (1 Org x 2 Jl)	2 Oj	450.000	900.000
	Honor Narasumber, Pembahas (1 Or x 2 Jm)	2 OJ	500.000	1.000.000
521219	**Belanja Barang Non Operasional Lainnya:**			
	Paket Full Day (30 Org x 1 Hr)	30 OH	275.000	8.250.000
	Uang Saku (30 Org x 1 Hr)	30 OH	70.000	2.100.000
	Transport Peserta (30 Org x 1 Hr)	30 OH	110.000	3.300.000
	TOTAL (Tahap I + II)			**73.610.000**
	Terbilang:========= Tujuh puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah ==========			

Catatan:
****) Narasumber dari pusat adalah:***
Ketua Bidang, Kasubbag TU atau APU

Jakarta, Maret 2012
Kepala,

Drs. H. Imran Siregar, M.Pd
NIP. 195606251985031001

KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 dan 8 Tahun 2006
di Ogan Komering Ulu Timur
Sumatera Selatan

Tim Peneliti:
Muhammad Adil, Duski, Syahril Jamil

SYARIAH
IAIN RADEN FATAH PRESS

KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006
di Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan

Muhammad Adil, Duski, Syahril Jamil

Desain Sampul: SRFpress
Desain Isi: SRFpress

Penerbit:
Syariah IAIN Raden Fatah Press
Jalan Zainal Abidin Fikry km 3,5
Palembang 30126
Tel. & Fax. +62 711 361035
E, mail: m.adil73@yahoo.com

Hak cipta 2012

ISBN:
Cetakan I, Agustus 2012

Didistribusikan oleh:
Syariah IAIN Raden Fatah Press
E, mail: m.adil73@yahoo.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Muhammad Adil, Duski, Syahril Jamil
KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA/Muhammad Adil,
Duski, Syahril Jamil
Palembang: Syariah IAIN Raden Fatah Press, 2012
xii + 189 hlm. 14 X 21 cm
ISBN:

I.Kerukunan	II. Studi Keislaman
I. Judul	II. Muhammad Adil, Duski, Syahril Jamil

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI, vii
PENGANTAR, ix
BAB I PENDAHULUAN , 1
BAB II LANDASAN TEORETIS, 31
A. Teori Tindakan Komunikasi, 31
B. Eksistensi Teori Tindakan komunikasi dalam Pluralisme, 37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, 61
A. Pendekatan dan Wilayah Studi, 61
B. Sumber data, 64
C. Analisis data, 69

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN, 71
A. Kondisi Geografis Oku Timur, 71
B. Kondisi Demografis, 75
C. Kondisi Sosial Keagamaan, 78
D. Kondisi Ekonomic , 87

BAB V EVALUASI PELAKSANAAN PBM TAHUN 2006 DI OKU TIMUR SUMATERA SELATAN, 101
A. Karakteristik Responden, 103
B. Tingkat Pengetahuan tentang PBM, 108

C. Derajat Sikap terhadap PBM, 112
D. Desiminasi Informasi, 116
E. Peraturan Bupati tentang PBM, 118
F. Peran Pemkab dalam KUB, 118
G. Peran Kelompok Agama dalam KUB, 124
H. Dinamika FKUB, 126
I. Pemenuhan syarat dalam Mendirikan Rumah Ibadah, 128
J. Tingkat toleransi antar umat beragama, 131
K. Kumunikasi Antar Umat Beragama di OKU Timur, 134

BAB VI PENUTUP, 173
A. Kesimpulan, 173
B. Rekomendasi, 174

DAFTAR PUSTAKA, 177

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur para peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT. atas telah selesainya laporan penelitian tentang kerukunan antar umat beragama merupakan evaluasi PBM Tahun 2006 yang berlokasi di Oku Timur Sumatera Selatan.

Penelitian ini merupakan kerjasama Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang. Untuk itu perlu kiranya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Marzani Anwar yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dan komentar, komentarnya sehingga laporan penelitian ini bisa selesai seperti sekarang ini
2. Prof. Dr. Suyitno, M.Ag yang telah memberikan arahan dan masukan pada saat seminar proposal penelitian
3. Dr. Heri Junaidi, MA yang juga telah memberikan masukan dan komentarnya dalam seminar hasil penelitian yang di gelar di Hotel Syahid Imara Palembang
4. Para dosen yang terlibat sebagai peserta, mulai dari seminar proposal sampai dengan pelaksanaan seminar hasil
5. Pak Zainal (dari Balai Litbang Kemenag) yang

telah menemani proses administrasi sehingga berjalan dengan baik

Para peneliti berharap kiranya semua bentuk partisifasi menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. dan akan mendapatkan ganjaran pahala

Akhirnya, semoga Allah SWT. melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah serta ma'unah, Nya sehingga penelitian ini bermanfaat.

Palembang, September 2012.

Peneliti.

Muhammad Adil, Duski, Syahril Jamil

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumatera Selatan[1] di era otonomi daerah, dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami kemajuan yang cukup pesat. Terbukti dengan digelarnya berbagai kegiatan besar seperti pertemuan olah raga negara-negara Asia Tenggara, *Sae Games* 2011, pertemuan

[1]Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 10 (sepuluh) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota. Pemerintahan Kabupaten/Kota tersebut adalah: Kab. Ogan Komering Ulu (Ibukota Baturaja), Kab. OKU Timur (Ibukota Martapura), Kab. OKU Selatan (Ibukota Muara Dua), Kab. Ogan Komering Ilir (Ibukota Kayu Agung), Kab. Muara Enim (Ibukota Muara Enim), Kab. Lahat (Ibukota Lahat), Kab. Musi Rawas (Ibukota Lubuk Linggau), Kab. Musi Banyuasin (Ibukota Sekayu), Kab. Banyuasin (Ibukota Pangkalan Balai), Kota Ogan Ilir (Ibukota Indralaya), Kota Palembang (Ibukota Palembang), Kota Pagar Alam (Ibukota Pagar Alam), Kota Lubuk Linggau (Ibukota Lubuk Linggau), Kota Prabumulih (Ibukota Prabumulih). Jumlah desa di Sumatera Selatan sebanyak 343. Dan Jumlah kecamatan sebanyak 149 buah. Dengan jumlah penduduk sekitar 6,7 juta jiwa (3,29 %). Badan Pusat Statistik, *Sumsel dalam Angka 2010*, Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan tahun 2010

Parlemen Islam Dunia (PUIC) 2012, serta berbagai even lain. Di dalam melaksanakan roda pemerintahan Sumatera Selatan yang saat ini di pimpin gubernur Alex Noerdin—pernah dicalonkan oleh partai Golkar sebagai calon Gubernur DKI, meskipun "kalah"—menjadi harapan untuk menjawab setiap permasalahan dan tantangan sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lainnya dalam masyarakat.

Sumatera Selatan memiliki ciri masyarakat yang majemuk multi-etnik, budaya, dan agama. Dalam konteks agama, terdapat 5 agama yang diakui oleh pemerintah seperti Islam, Katholik, Kristen, Budha dan Hindu. Di antara agama-agama tersebut, Islam memiliki pemeluk terbesar, data statistik pada tahun 2010 menunjukkan bahwa persentase pengikut agama Islam sebesar 94,43 persen, Katholik 1,04 persen, Kristen 1,83 persen, Budha 1,80 persen dan Hindu 0,90

persen.[2] Namun demikan, mereka hidup saling menghormati satu sama lain.

Keragaman suku, budaya, dan agama di Sumatera Selatan terjadi di setiap kabupanten kota dan akan sangat kentara, ketika melihat kabupaten OKU Timur sebagai sebuah sampel. Bahkan "mungkin" kabupaten ini kelak bisa disebut sebagai refrensentasi atau miniaturnya keberagaman bangsa Indonesia. Di beberapa tempat di OKU Timur, bahkan terdapat gereja yang dikelilingi oleh pesantren dan beberapa tempat ibadah lainnya seperti masjid dan mushalla.

Sebenarnya, seperti itulah contoh pluralitas suku, budaya dan agama di era globalisasi yang juga menjadi karakteristik dari bangsa Indonesia

[2]Badan Pusat Statistik, *Sumsel dalam Angka 2010*, Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan tahun 2010

yang heterogen.[3] Sehingga tidak bisa dipungkiri, pluralitas agama, misalnya, akan memiliki potensi dan peran sangat besar dalam proses integrasi dan pembangunan di OKU Timur. Realitas ini, dalam bahasa agama adalah mewajibkan umatnya untuk mencintai sesama dan hidup rukun. tidak terkecuali, Islam. Dalam

[3]Keberagaman hubungan sosial, budaya, agama, suku bangsa dan dialek (bahasa) kedaeharan menjadi realitas kebangsaan yang tak terbantahkan eksistensinya. Eksistensi kemajemukan ini harus diekspresikan dalam membangun relasi mutualis simbiosis antarumat yang hidup dalam satu komunitas besar seperti bangsa Indonesia. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural Cross Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2007, hlm. 3-4; bahwa Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di Indonesia. Kenyataan ini terlihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Hajjah Bainar, menulis bahwa struktur masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dan dinamis. Ini ditandai keragaman suku bangsa, agama, ras, bahasa, dan kebudayaan. Kemajemukan itu menjadi kekayaan budaya yang menjadi kekuasan sekaligus mengandung potensi konflik. NKRI merupakan potret Negara yang pluralis yang mendiami sekitar 17.667 pulau yang terbentung dari Sabang sampai Merauke sambung menyambung menjadi satu. Indonesia terdiri dari sekitar 962 suku bangsa dengan beragam budaya, agama, bahasa (dialek). Unsur tersebut membuktikan adanya kemajemukan. Hajjah Bainar, et al, *Ilmu Sosial, Budaya dan Kealaman Dasar,* Jakarta: Jengki Satria, 2006, hlm. 98-99

Alquran surat al-Hujurât: 10 yang mengajarkan: "*Sesungguhnya orang-orang beriman itu tidak lain adalah bersaudara. Maka, damaikanlah antara dua saudaramu, dan bertakwalah pada Allah supaya kamu dirahmati*".

Di samping itu, pluralitas agama ini juga tidak menutup kemungkinan mengandung potensi terjadinya konflik, yang mengarah kepada disintegrasi bangsa, ketika melihat masing-masing agama memiliki klaim kebenaran absolut dan muatan emosi keagamaan yang menjadi dasar interaksi primer. Konflik atas dasar perbedaan agama bisa disebabkan, baik oleh ajaran agama itu sendiri, kualitas moral-spiritual penganutnya, maupun latar belakang budaya, seperti kultur patriarkal atau ikatan primordial yang masih kuat. Secara struktural perbedaan agama tersebut berkaitan erat dengan rasa

insecurity dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Tentu saja, kerukunan hidup beragama masyarakat Oku Timur yang dicita-citakan untuk masa-masa mendatang bukan sekadar kerukunan yang semu, melainkan kerukunan yang mantap, kerukunan yang otentik, positif, kerukunan melalui pendekatan komunikasi teologis yang saling pengertian. Aspek kerukunan merupakan nilai yang dapat ditemukan dalam ajaran setiap agama maupun dalam aktivitas sosialnya. Kerukunan merupakan nilai yang universal, karenanya semua manusia pada dasarnya berkepentingan untuk merealisasikannya. Di antara usaha-usaha untuk mewujudkan kerukunan hidup umat beragama itu adalah melalui dialog antar agama yang simultan.

Fakta pluralitas agama tidak bisa dihindarkan. Kelompok agama satu hidup

berdampingan dengan kelompok agama lainnya. Dalam upaya mewujudkan kerukunan, fakta pluralitas itu hendaknya diterima, sebagaimana diungkapkan oleh Nurcholis Madjid bahwa:

> "Paham keagamaan hendaknya menghilangkan absolutsime dan menerima pluralisme, bila agama itu diharapkan memberi kontribusi dalam agama, tapi pemahaman manusia terhadap yang mutlak tetap dibatasi oleh kapasitasnya sebagai manusia. Sumber konflik agama biasanya terdapat pada sikap-sikap yang mengklaim bahwa hanya dirinyalah yang paling benar, dan yang lain dianggap salah. Kerena itu, pengajaran keagamaan hendaknya belajar meninggalkan pikiran absolutistik dan mengajarkan kepada penganut agama untuk bersikap moderat dan toleran serta menerima pluralisme".[4]

Pluralitas agama pun tampak pada masyarakat Sumatera Selatan yang memiliki

[4]Kompas, 5 Mei 1996

wilayah dengan luas daerah seluruhnya 8.702.741 hektar. Kenyataan itu memungkinkan pluralitas agama merupakan tantangan untuk terciptanya kerukunan hidup beragama, mengingat agama mengandung potensi disintegrasi maupun potensi integrasi. Dalam rangka mengantisipasi potensi disintegrasi, perlulah adanya upaya-upaya mencapai kesaling-mengertian seperti upaya mencari titik temu agama. Yakni, dengan menyadari terdapatnya dimensi yang relatif dan absolut dari setiap agama. Upaya untuk mencapai kesaling-mengertian akan mencerminkan dinamika kehidupan beragama, seperti yang terjadi dalam dialog antar agama.

Potensi konflik atau disintegrasi ini sangat dalam akibatnya, sangat luas dan besar implikasinya, dan dapat menelan ongkos sosial, politik dan ekonomi yang teramat mahal. Konflik yang dilatarbelakangi oleh faktor agama, lebih

berbahaya lagi dibandingkan dengan latar belakang lain. Hal ini disebabkan mengingat watak agama itu sendiri yang tidak mengenal batas sosiologis, demografis, maupun geografis. Di samping itu, agama sangat berpengaruh dalam totalitas kepribadian, serta penghayatan pada tingkat lapisan awam.

Jika melihat kepada perjalanan panjang sejarah Sumatera Selatan dengan ibukotanya Palembang, dahulunya pernah menjadi pusat beberapa kerajaan besar, seperti Sriwijaya[5] yang

[5]Menurut Gabriel Ferrand sebagaimana dikutif Abdullah Idi bahwa Kerajaan Sriwijaya berdiri sejak tahun 392 M. pendapat ini berdasarkan kronik Cina yang menyatakan tentang negeri bernama *she-yeh* (*Cho-ye*)—artinya Jaya atau Wijaya atau Sriwijaya. Belakangan I-Tsing menyebut Sriwijaya dengan sebutan *Shih-li-fo-shih*. Sementara dalam catatan Arab, yang berbeda dengan kronik Cina, Sriwijaya disebut dengan *Syarbazah*. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara selain Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Mataram. Di masa jayanya, wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya tersebar dari sebagain besar Pulau Jawa dan Sumatera hingga ke Semenanjung Malaya yang dikenal dengan sebutan Swarnadwipa. Kerajaan Sriwijaya telah dikenal pula oleh kalangan masyrakat dunia. Abdullah Idi, *Kerajaan Sriwijaya,*

bercorak Hindu-Budha,[6] pernah pula berada di bawah bayang-bayang Majapahit, dan terakhir sebagai Kesultanan Palembang.[7] Palembang dianggap pula sebagai pendiri Kerajaan Islam (Demak) di Jawa, sehingga membuat Palembang mempunyai corak Melayu-Jawa.[8] Agama dan

---

Nilai-nilai Integrasi dan Implikasinya terhadap Kebijakan Otonomi Daerah, (Palembang: Unsri, 2001), hlm.1

[6]Dalam sejarah Melayu dikisahkan ada tiga orang anak Raja Suran yang dipelihara Raja Aktabul Ard yang merupakan anak cucu Raja Iskandar Zulkarnaen, turunan Nabi Sulaiman Alaihissalam, melalui Raja Nusyirwan Raja Masyriq dan Maghrib turun kedunia berkendaraan lembu putih dan turun di bukit Siguntang, kemudian dengan menunjukkan berbagai kesaktian, akhirnya mereka diterima oleh Raja Palembang Demang Lebar Daun. Ketiga anak itu masing-masing bernama Nila Pahlawan (bergelar Sang Si Perba) kemudian menjadi Raja Minangkabau, Krisna Pandita kemudian menjadi Raja Tanjung Pura dan Nila Utama (bergelar Seri Teri Buana), kemudian menjadi Raja Palembang dan kawin dengan puteri Demang Lebar Daun. Seri Teri Buana inilah yang dianggap sebagai pendiri Kerajaan Melayu di Nusantara. Lihat Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam Studi Tentang Pejabat Agama masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, (Jakarta: Logos, 1998), hlm.3

[7]Salman Aly, Sejarah Kesultanan Palembang, dalam Gajahnata dan Sri Edi Swasono, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan* (ed), (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.126

[8]Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam Studi Tentang Pejabat Agama masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 3

budaya yang telah lebih dahulu tumbuh dan berkembang di Palembang tentu saja sudah menjadi keyakinan masyarakat sejak lama, kondisi ini telah menjadikan Palembang sebagai tempat yang sangat penting dalam persentuhannya dengan berbagai peradaban, agama, dan tradisi di Nusantara.[9]

Fenomena Palembang (sekarang Sumatera Selatan) yang secara historis memiliki potensi pendukung dalam upaya kerukunan hidup beragama sudah terbentuk sejak lama. Konsep saling terbuka dengan kedatangan budaya atau agama lain, nilai-nilai kegotong-royongan, saling menghormati dan menghargai kebebasan dalam menjalankan aktifitas ibadah sesuai dengan agamanya, serta kerjasama dikalangan intern umat beragama.

[9]Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam*, hlm. 7

Meskipun demikian, jika dilihat lebih jauh bahwa perspektif dimensi agama, ajaran agama mengandung klaim kebenaran yang bersifat universal. Hal ini memungkinkan terjadi ambiguitas dalam interpretasi menurut tingkat pemahaman, penghayatan, dan moralitas--spiritualitas penganutnya. Fenomena ini tampak dalam penggunaan konsep-konsep atau simbol-simbol agama untuk orientasi tertentu ketika melibatkan emosi keagamaan penganutnya. Untuk itu, menghindari konflik atau mewujudkan kerukunan umat beragama merupakan nilai universal. Dengan nilai ini, semua manusia melalui agamanya diharapkan dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, saling toleransi, dan bekerjasama dalam menangani persoalan kemanusiaan. Di antara usaha untuk menghindari konflik atau mewujudkan

kerukunan umat beragama itu, tentunya ada upaya untuk saling mengenal di antara agama-agama melalui dialog antar umat beragama. Bahkan perlu membuat format kerukunan antar umat bergama. Sehingga bisa dijadikan model percontohan hubungan antar umat beragama.

B. Rumusan Masalah

Sejak tahun 2006 yang lalu telah diberlakukan Peraturan Bersama Menteri nomor 9 dan 8. Untuk melaksanakan aturan ini pemerintah telah melakukan berbagai strategi kegiatan di antaranya mengadakan sosialisasi, hal ini dilakukan dalam rangka untuk melakukan pembelajaran kepada masyarakat supaya dapat memahami dan melaksanakan aturan yang berkaitan dengan KUB supaya masyarakat mengerti dan mendapatkan pemahaman yang menjadi misi bersama umat beragama, sehingga pada saatnya umat bisa saling

menghormati. Pemerintah menganggap perlu melakukan advokasi terhadap umat beragama di antaranya juga dengan melakukan efektifitas pemberdayaan umat melalui FKUB, juga melakukan pemahaman kepada masyarakat ketika akan mendirikan rumah ibadah. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan pentingnya *output* dan *outcome*.

Output dari pelaksanaan PBM ini tentu saja adalah tertanamnya nilai kesepahaman yang akan mendasari pemeluk agama untuk memiliki perilaku yang komunikatif terhadap perbedaan. Sehingga *output* pelaksanaan PBM dapat dikatagorisasi dalam dua kelompok. *Pertama*, kuatnya nilai-nilai kerukunan umat beragama, FKUB, dan pendirian rumah ibadah. *Kedua*, umat beragama dapat melaksanakan dan menerapkan PBM dengan baik.

Outcome yang akan didapatkan paling tidak misalnya dimasing-masing daerah akan ditindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah

tentang KUB yang di dalamnya merupakan bukti konkrit keterlibatan pemerintah di daerah, juga terdapat keterlibatan peran kelompok umat beragama di daerah.

Rentang waktu pelaksanaan PBM sejak tahun 2006 belum diketahui secara konkret aturan ini dapat dilaksanakan yang menjadi tujuan *output* dan *outcome* itu. Sehingga perlu dilakukan studi evaluasi dari pelaksanaan PBM.

Dari uraian di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dapat dikaji: *pertama*, apakah pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di OKU Timur sudah dilakukan dengan baik? *Kedua*, apakah dalam mendirikan rumah ibadah, di Kabupaten OKU Timur masyarakat memenuhi syarakat-syarat sesuai dengan PBM?, *ketiga*, apakah sudah cukup efektif usaha yang dilakukan oleh pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam menjaga kerukunan antar umat

beragama di OKU Timur, sehingga harapan pemerintah melalui PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dapat terwujud?.

Kalau masalah-masalah di atas bisa dijawab, maka akan diperoleh suatu model atau format kerukunan antar umat beragama, diharapkan nantinya dapat menjadi model di tempat-tempat lain dalam hal hubungan antar umat beragama. Dengan demikian, efektifitas pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri akan dapat terwujud.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan: *pertama*, mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan PBM. *Kedua*, mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan mungkin menhambat dalam hal efektifitas dari tujuan diadakannya aturan tentang PBM. *Ketiga*, merumuskan model atau format kerukunan umat

beragama yang efektif. Dengan tujuan ini akan terlihat peran yang dilakukan oleh pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di OKU Timur Sumatera Selatan, sehingga harapan pemerintah melalui PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dapat terwujud.

Dengan begitu, riset ini bertujuan pula untuk meletakkan hubungan yang inklusif dan efektif sebagai model bagi dialog antar umat beragama, dan diharapkan dapat memeroleh, *pertama*, pemahaman secara komprehensif akan kebutuhan dialog antar umat beragama di tengah kehidupan yang semakin plural. *Kedua*, menjelaskan secara utuh tentang makna dialog antar umat beragama di Sumatera Selatan. Selain itu, secara umum dalam konteks keindonesiaan penelitian ini ditujukan untuk pengembangan kebijakan hubungan antar umat beragama.

Dan, khususnya pembinaan penguatan integrasi bangsa. Secara akademis, riset ini pun ditujukan untuk pengayaan khazanah studi keisalaman (*Islamic studies*) mengenai kerukunan umat beragama.

Tercermin dengan diakuinya eksistensi lima agama besar.[4] Yaitu, Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha, sebagaimana yang tercermin dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. Meskipun, dalam kenyataan terdapat agama lainnya, hal itu merupakan potensi dan kekayaan utama bagi pembinaan mental dan spiritual bangsa. Sebab, setiap agama dalam ajarannya mewajibkan umatnya untuk mencintai sesamaanya dan hidup rukun.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan pengayaan wawasan berfikir secara kritis dan analitis dalam menyikapi kondisi lingkungan masyarakat yang beragam. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk membangun sikap kearifan dan menyikapi setiap perbedaan. Juga memberikan pengetahuan terhadap masyarakat secara umum tentang hubungan umat beragama di OKU Timur, Sumatera Selatan agar dapat diambil mafaatnya sebagai sebuah wacana yang tidak terlepas dari sejarah kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Sebagai sumbangan demi terciptanya toleransi di tengah pluralitas agama supaya terjalin hubungan yang saling menghargai dalam perbedaan, saling menghormati satu dengan lainnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan hubungan antar umat beragama di Sumatera Selatan memang masih sedikit jumlahnya. Pemetaan keagamaan pernah dilakukan oleh Mal An Abdullah, Abdul Amri Siregar, dan Siti Rochmiatun[10] mengambil lokasi di Lubuk Linggau. Dalam penelitiannya, mereka menampilkan hubungan masing-masing umat beragama yang hidup di Lubuk Linggau, memetakan potensi-potensi keagamaan yang dianggap mungkin bisa dikembangkan untuk menjaga harmonisasi hubungan masing-masing pemeluk agama. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk menjaga hubungan antar umat beragama.

[10]Mal An Abdullah, Abdul Amri Siregar, dan Siti Rochmiatun, Pemetaan Keagamaan di Lubuk Linggau, Tahun 2002, kerjasama IAIN Raden Fatah dengan Pemerintah Lubuk Linggau

Penelitian yang dilakukan oleh Heri Junaidi[11] tentang filsafat Wong Kito Galo menggambarkan hubungan yang selama ini harmonis terjadi di Sumatera Selatan disebabkan memiliki falsafah hidup yang menjadi induk akar budaya, kemudian melahirkan slogan turunan bagi kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Selatan seperti *serasan sekate, serasan sekundang, dek pacak ngiloi njage jadilah*, dan lain-lain. Penelitian ini menjadi semangat inspiratif bagi masyarakat sebagai kearifan lokal untuk saling bantu, gotong royong, saling menghargai antarsesama manusia

Di samping itu, terdapat sejumlah penelitian mengenai kerukunan antar umat beragama, baik itu penelitian normatif maupun empiris-sosiologis.

[11]Heri Junaidi, Filsafat Wong Kito Galo, Peneltian IAIN Raden Fatah Tahun 2010

Penelitian Tomas Santoso[12] tentang kekerasan politik-agama adalah sumber informasi yang cukup lengkap mengenai kronologis terjadinya kerusuhan situbondo. Thomas menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan peristiwa tersebut juga tentang teori kekerasan politik-agama pada umumnya. Walaupun peneliti beragama Kristen, tetapi secara keseluruhan pendapatnya cukup netral.

Tulisan mengenai kerukunan hidup antar umat beragama dengan pendekatan empiris-sosilogis yang diteliti pada tahun 2005, dilakukan oleh Feryani Umi Rosyidah[13] tulisan ini cukup menjadi rujukan sesuai dengan tema yang akan

[12]Thomas Santoso, *Kekerasan Politik-Agama: Suatu Studi Konstruksi Sosial Tentang Perusakan Gereja di Situbondo, 1996* (Disertasi) Universitas Airlangga Surabaya, 2002

[13]Feryani Umi Rosyiah, *Kerukunan Hidup Antarumat Beragama: Studi tentang hubungan Antar Umat Beragama dan Komunitas Kristen di Komplek Waru Surabaya*, (Tesis) IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005

peneliti lakukan. Ia banyak mengungkap tentang hubungan antara umat Islam dan komunitas Kristen yang cukup harmonis dengan adanya kerjasama dalam banyak aspek, seperti sosial kemasayarakatan.

M. Zainuddin[14] mengungkapkan konstruksisosial elit agama tentang pluralisme dan dialog antar umat beragama. Menurutnya kelompok elit Islam fundamentalis, konstruksi pluraisme agama berwajah deontic-diachronic/ non-reduksionis, sika keberagamaan mereka bercorak eksklusif-Islamsentris dan pola relasi mereka bercorak ko-eksistensis. Bagi elit moderat Islam, pluralisme agama mereka berwajah normatif (*normative-religiuos pluralizm*), sikap keberagaman mereka ada yang bercorak pro-eksistensi. Bagi elit

[14]M. Zainuddin, *Relasi Islam-Kristen: konstruksi Sosial elit Agama tentang Pluralism dan Dialog antar umat Beragama di Malang*, (Disertasi) IAIN Suman Ampel, Surabaya, 2008

Kristen sendiri sikap keberagamaan mereka bercorak plural. Sedangkan pola relasi mereka sama dengan elit moderat Islam yakni pro-eksistensi. Oreintasi dialog antar umat beragama yang dibangun oleh elit agama di Malang (baik elit Islam maupun kristen) pada umumnya berorientasi kemasyarakatan (*dialogue in community*), kecuali dari elit fundamentalis yang berorientasi teologis-Islamisasi.

Abdul Mu'ti dan Fajar Riza ul-Hak[15] dengan perspektif empiris-sosiologis memaparkan bahwa orientasi gerakan Muhammadiyah sangat menekankan pentingnya kehadiran ruang perjumpaan antar identitas yang berbeda. Mayoritas elit Muhammadiyah di Ende, Yapen Waropen Kapuas Hulu mengakomodasi sekolah

[15]Abdul Mu'ti dan Fajar Riza ul-Haq, *Kristen-Muhammadiyah: Korvegensi Muslim dan Kristen dalam Pendidikan*, (Jakarta: alWasat Publishing HouseI, cet, 1, 2009

Muhammadiyah terhadap siswa-siswi non Muslim dengan tetap memperlihatkan sikap toleransi bahkan apresiasi terhadap kebutuhan pendidikan agama.

Penelitian oleh Irfan Riyasi dan Basuki[16] memamparkan tentang potret kesadaran masyarakat Muslim dan Kristen desa Klepu kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo yang termasuk katagori inklisivisme-hegomonistik. Hubungan mereka sudah dikembangkan dalam kontek yang lebih luas, yaitu dari *ikhwan fi al-din* menuju *al-ikhwan fi basyariah* persaudaraan antar sekalian umat manusia.

Tulisan Atho Mudzhar[17] yang mengutamakan pendekatan normatif menyatakan

---

[16]M. Irfan Riyadi dan Basuki, *Membangun Inklusifisme Faham Kegamaan* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press), cet, 1, 2009

[17]Mohamad Atho mudzhar, "Pluralisme, Pandangan Ideologis, dan Konflik Sosial Bernuansa Agama". Dalam Moh. Saleh Isre (ed), *Konflik etno Religius Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Balitbang Depag RI, 2003) hal. 5-6

tentang bertemunya empat elemen utama yang terjadi dalam suatu konflik sosial. Keempat elemen itu ialah *facilitating contexts* (kontek pendukung), *core (roots) of conflict* (akar konflik) *fuse factor* (sumbu), dan *triggering factors* (pemicu).

Para ahli sosiologi mengatakan bahwa dampak suatu konflik bergantung pada tataran apa akan konflik itu berada dan terjadi, jika akar konflik itu berada pada tataran instrumental, biasanya konflik itu akibatnya tidak terlalu luas dan dapat segera berhenti. Tatapi jika konflik itu berada pada tataran ideologi, biasanya berakibat lebih besar, bahkan mengerikan dan dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

Pendekatan empiris-sosiologis di dalam penelitiannya juga dilakukan oleh Eko Aliroso.[18] Ia

[18]Eko Aliroso, "Peta Kerukunan Umat Beragama Propinsi Bali". Dalam Tim Penulis, *Riuh di Beranda satu; Peta Kerukunan umat Beragama di Indonesia*, Seri II (Jakarta: Balitbang Depag RO, 2003), hlm. 125

mengungkapkan kerukunan umat beragama di Propinsi Bali, bahwa secara umum kondisi kerukunan di propinsi Bali yang masyarakatnya majemuk baik dari segi agama, adat istiadat cukup baik. Masyarakat Bali (etnik) yang mayoritas pendududknya beragama Hindu bersikap cukup terbuka bagi pendatang yang *nota bene* beragama lain, berbudaya dan memiliki adat istiadat yang berlainan pula. Hanya saja pernah terjadi kasus yang sangat kental bernuansa politis. Yakni ketika kubu PDIP sebagai pemenang pemilu pada waktu itu dikalahkan oleh kubu lainnya di MPR dan akhirnya menampilkan Gus Dur sebagai presiden. Pemulihan keamanan waktu itu tidak semata-mata dilakukan oleh aparat keamanan, namun peran tokoh agama cukup besar dalam meredam suasana.

Selain di Bali yang penganut Islamnya minoritas, di propinsi Nusa Tenggara Timurpun penganut Islamnya hanya 9% terbesar ketiga

setelah Katolik dan Kristen. Penelitian Ibnu Hasan Muchtar[19] ini memaparkan bahwa sejak dahulu corak hubungan pergaulan, dimana komunikasi antar pemeluk agama yang berbeda terbuka secara wajar, rasa toleransi nampak memegang peranan sangat penting untuk saling menghormati. Terutama dalam urusan kemasyarakatan seperti gotong royong menyangkut satu beban desa, dalam kunjung-mengunjungi pada peristiwa perkawinan, kematian dan khitanan.

Walaupun masyarakat NTT sangat mejemuk, tetapi memeiliki keperibadian yang dapat dijadikan sebagai alat untuk membangun kerukunan, yaitu sistem pola kekerabatan. Dimana masyarakatnya talah menyatu yang diikat oleh kesamaan keturunan darah, dan lewat perkawinan

[19]Ibnu Hasan Muchtar, "Peta Kerukunan umat Beragama Propinsi Nusa Tenggara Timur". Tim Penulis, *Riuh di Beranda satu; Peta Kerukunan umat Beragama di Indonesia*, Seri II (Jakarta: Balitbang Depag RI, 2003), hlm. 203

antara individu yang dalam hal ini jauh lebih menonjol dalam pergaulan sosial sekalipun satu sama lainnya berbeda agama.

Tulisan Ridwan[20] dengan pendekatan normatifnya manyatakan bahwa Piagam Madinah dapat disebut sebagai sebuah konstitusi sebuah negara sekaligus sebagai resolusi konflik untuk mengakhiri konflik dengan damai di antara anggota masyarakat Madinah. Piagam Madinah juga menjadi *starting point* bagai penataan hubungan antar umat beragama di Madinah untuk hidup berdampingan secara bermartabat yang sangat signifikan untuk dijadikan model dalam membangun hubungan antarumat beragama sekaligus hubungan intern umat beragama.

[20]Ridwan, "Piagama Madinah dan Resolusi Konflik: Model Penataan Hubungan Antarumat Beragama". Dalam Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Libang dan Diklat Departemen Agama RI, *Harmoni*, Jurnal Multikultural dan Multireligius, volume VIII, Nomor 30, April-Juni 2009. Hlm. 141

Dengan demikian, jika memperhatikan penelitian sebelumnya, penelitian yang mengarah kepada evaluasi pelaksanaan kerukunan yang dapat dijadikan model hubungan antar umat beragama masih belum tampak, sehingga peneliti menganggap perlu untuk mengangkat tema ini dengan pintu masuk kerukunan antar umat bergama di Sumatera Selatan dengan sampel Kabupaten OKU Timur.

BAB II
LANDASAN TEORETIS

A. Teori Tindakan Komunikasi

Untuk mencapai dialog antar umat beragama yang ideal, bebas dari hambatan dan kesulitan, perlu dilihat kondisi, situasi, atau prasyarat dialog tertentu. Jürgen Habermas menegaskan bahwa "dengan memahami komunikasi sebagai dimensi praksis manusia, teori tindakan komunikasi dapat memberikan landasan bagi terselenggaranya dialog antar umat beragama yang ideal, yang didasarkan pada rasionalitas komunikatif."[21]

Dengan begitu, fokus kajian mencakup bidang etika sosial, yaitu suatu jenis etika yang

[21]Jürgen Habermas, *Communication and the Evolution of Society*, trans. Thomas McCarty (London: Heinemann, 1979), hlm. 207.

bersifat praksis (*practical reasoning*) sebagaimana yang terungkap dalam pertanyaan apa yang secara praksis berguna, secara etik baik dan secara moral benar. Dalam konteks ini, persoalan tersebut menyangkut anggapan-anggapan normatif dari interaksi sosial, yaitu dimensi komunikasi perbincangan rasional dalam dialog antar umat beragama. Di samping itu, mencakup psikologi sosial moral yang berkaitan dengan aspek kualitas moral dalam hubungan interaksi sosial.

Kenyataan memerlihatkan bahwa agama merupakan suatu sistem yang total. Menurut Koentjaraningrat dengan mengutip pendapat Emile Durkheim dalam karyanya yang terkenal *Les Formes Elementaires de la vie Religieuse* (1912), menyatakan bahwa ada empat unsur pokok dalam agama, yaitu emosi keagamaan, sistem kepercayaan, sistem upacara, dan komunitas

keagamaan.[22] Emosi keagamaan menyebabkan manusia menjadi religius. Sistem kepercayaan mengandung keyakinan serta bayangan-bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan serta tentang wujud dari alam gaib. Sistem upacara religius yang bertujuan mencari hubungan manusia dengan Tuhan, dewa-dewa atau mahluk-mahluk halus yang mendiami alam gaib. Dan, kelompok-kelompok religius atau kesatuan-kesatuan sosial yang menganut sistem kepercayaan dan melakukan sistem upacara-upacara religius.

Dalam hubungan antar komunitas dan emosi keagamaan, akan terbentuk ikatan primer dan solidaritas kelompok, mengingat emosi keagamaan merupakan juga dasar ikatan primer dalam komunitas masyarakat dan sumber dari

[22]Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1978), hlm. 136-137.

sentimen kemasyarakatan, di mana kesadaran tentang hubungan itu menjadi paling kuat dan paling mudah disinggung dan dilukai. Sehingga, umat beragama gampang disulut bagi timbulnya konflik mengatasnamakan agama.

Adanya pluralitas agama sebagai fakta sosiologis, nyatanya tidak berhenti begitu saja. Bagi para pemeluknya, semua jerih payahnya pada akhirnya akan tiba pada satu tujuan atau titik temu yang sama, yaitu menuju Tuhan Yang Maha Esa. Proses menuju Yang Maha Esa ini atau perjalanan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa ini merupakan sebuah upaya pendakian spiritual. Menurut Bhagavan Das (1966), hal itu disebut sebagai *The Road of Life*. Pluralitas agama memang suatu fakta sebagai jalan yang beragama bagi manusia untuk menuju yang Esa (Satu).

Dalam Islam, menurut Budhi Munawar Rahman, *The Road of Life* dibangun atas dasar

gagasan bahwa ada satu realitas yang unik, yaitu Tauhid, entah orang memakainya secara eksoterik maupun esoterik. Sedangkan, *The Road of Life* dalam Yahudi (dan juga Kristen), dikonstruksikan melalui persaksiaan atas perjanjian antara Tuhan dengan suatu masyarakat suci (*holy community*). Karena itu, dalam agama ini diperlukan sakramen dan ekaristi sebagai penciptaan *holy community*.[23]

Filsafat perennial (*perennial philosophy*) mengungkapkan bahwa *The Road of Life* itu membawa "tradisi" yang biasa dilihat dari dua arah. Yakni, dari sisi ketuhanan adalah narasi tentang "asal usul". Dan, dari sudut manusiawi adalah "jalan" kembali kepada Tuhan, kepada "yang asal". Jadi, meskipun secara esoterik, agama itu bersifat plural (pluralisme agama),

[23]Sukidi, "Dari Pluraisme Agama Menuju Konvergensi Agama-agama" dalam *Kompas*, 17 Oktober 1998.

namun secara esoterik semuanya akan bermuara kepada satu Tuhan atau Tuhan Yang Maha Esa.

Upaya menuju ke satu Tuhan ini, menurut Komaruddin Hidayat dan Wahyuni Nafis, dapat ditempuh lewat pendekatan filsafat perennial.[24]

Pendekatan filsafat perennial ini diharapkan tidak hanya berhenti pada ditemukannya yang *Edos* (Class J. Bleeker), *Sensus Numinous* (Rudolf Otto), *Transcendental Focus* (Ninian Smart), *Essence of Religion* (Mircea Eliade), atau *Ultimate Reality* (Joachim Wach), melainkan diajak lebih jauh lagi. Yaitu, mengalami sendiri pengalaman keberagamaan berupaya penyatuan diri dengan Tuhan yang dihubungkan oleh pengetahuan sejati dan gelora cinta. Penggolongan antara pengetahuan sejati tentang yang Absolut ini bukan saja berhasil

[24]Sukidi, *Kompas*, 17 Oktober 1998.

menemukan titik temu (konvergensi) agama-agama, melainkan juga akan membentangkan berbagai kemungkinan "jalan", "tangga" "kapal" sebagai jalan untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya yang kini telah hilang akibat suatu cara dan pandangan hidup modern yang sekularistik.[25]

B. Eksistensi Teori Tindakan Kumunikasi dalam Pluralisme

Pluralisme merupakan tantangan bagi agama-agama. Dari sinilah arti penting pencaharian titik temu (konvergensi) agama-agama. Ada beberapa pertimbangan sebagai kerangka acuan akan arti pentingnya pencarian konvergensi agama-agama. *Pertama*, secara praktis pluralisme agama belum

[25]Sukidi, *Kompas*, 17 Oktober 1998.

sepenuhnya dipahami umat beragama, sehingga yang tampil ke permukaan justru sikap eksklusifisme beragama, yang merasa ajaran yang paling benar hanyalah agama yang dipeluknya. Agama-agama lain dituduh sesat, maka wajib dikikis atau pemeluknya ditobatkan, karena baik agama maupun pemeluknya terkutuk dalam pandangan Tuhan. Di sinilah akar konflik dimulai. Pluralimse agama memang belum sepenuhnya menjamin kerukunan hidup beragama. *Kedua*, di tengah-tengah pluralisme agama ini, hanyalah pemeluk agama tertentu (yang bersikap eksklusif) justru masih cenderung memonopoli kebenaran agama (*claim of truth*) dan laham keselamatan (*claim of salvation*). Pahadal secara sosiologis, *claim of truth* dan *claim of salvation* itu, selain

membuat berbagai konflik sosial politik, juga membawa berbagai macam perang antar agama.[26]

Pluralitas agama sebagai fakta sosiologis, yang pada akhirnya mencerminkan beragam jalan menuju yang Satu, merupakan permasalahan tentang yang relatif dan yang absolut. Pada dasarnya pemahaman manusia terhadap agamanya adalah realatif, namun semua ini pada hakikatnya demi yang Absolut. Sedangkan yang Absolut, yang Satu terungkap melalui jalan-jalan yang sifatnya relatif. Misalnya, fakta adanya pluralitas agama dan diversitas pemahaman agama. Menurut Paul F. Knitter (1985), pada dasarnya semua agama adalah relatif. Yang maknanya adalah terbatas, parsial, dan tidak lengkap. Karenanya, menganggap bahwa semua agama secara instrinsik lebih dari

[26]Sukidi, *Kompas*, 17 Oktober 1998.

yang lain. Sekarang menurut para ahli agama, dirasakan sebagai sebuah sikap yang agak salah, ofensif, dan merupakan pandangan yang sempit. Klaim seperti itu "wajib" dihindari dan jika perlu dikikis oleh umat beragama dengan diiringi penghargaan cakrawala yang luas dan paham keagamaan yang inklusif, egaliter, dan demokratis. Sehingga, semakin disadari bahwa semua agama pada dasarnya *Relatively Absolute* (Sayyed Nasser) atau sebaliknya *Absolutely absolutive*.

Usaha untuk memberi "titik temu" agama-agama, kiranya perlu dibingkai dalam format ketuhanan yang Maha Esa. Semua itu berasal dari satu Tuhan, maka pada tingkat transenden, kata Frithjof Schoun, semua agama akan mencapai titik temu. Atau, bagi Huston Smith (1973) bahwa landasan esoterik agama-agama itu sama. Sementara dalam perspektif filsafat perennial, kesamaan itu diistilahkan dengan *transcendent*

unity of religions (kesamaan transenden agama-agama). Jadi, pada tingkat *the common vision* (Huston Smith) atau pada tingkat *transcendent* (kaum perennialis) semua agama mempunyai kesatuan. Kalau tidak, malah kesamaan gagasan dasar.

Dalam konteks pluralitas agama, penerimaan adanya *the common vision* ini berarti menghubungkan kembali *the many* dalam hal ini realitas eksoteris agamaagama, kepada asalnya *The One*, Tuhan, yang diberi berbagai macam nama oleh para pemeluk berbagai agama sejalan dengan perkembangan kebudayaan dan kesadaran sosial dan spiritual manusia. Sehingga, kesan empiris tentang adanya agama-agama yang plural itu tidak hanya berhenti sebagai fenomena faktual saja. Akan tetapi, kemudian dilanjutkan bahwa ada satu Realitas yang menjadi pengikat yang sama

dari agama-agama tersebut, yang dalam bahasa simbolis bolehlah kita sebut dengan "agama itu".[27]

Agama yang satu berbeda dengan agama yang lain, tetapi kebenaran lain pun tak boleh disangkal bahwa di antara agama-agama itu terdapat persamaan yang seringkali menakjubkan. Kita sering begitu tercengkeram dalam bentuk-bentuk lahir keagamaan yang kita pertahankan mati-matian seolah-olah merupakan benteng terakhir. Padahal, itu sebenarnya merupakan juga produk salah satu generasi pendahulu kita.[28] Dengan menyadari bahwa pluralitas agama pada akhirnya akan mengantar kepada titik temu agama, asal tidak terpaku pada bentuk lahiriah agama yang eksoteris, namun memandangnya sebagai yang esoteris, sehingga mampu menyadari tentang segi-segi agama yang sifatnya relatif,

[27]Sukidi, *Kompas*, 17 Oktober 1998.
[28]Asfons Suhardi, *Kompas*, 25 Oktober 1986.

namun mengandung yang Absolut. Maka, di situlah akan terdapat dinamika kehidupan beragama, yang berpuncak kepada kerukunan hidup beragama.

Kehidupan beragama yang dinamis merupakan faktor dasar yang bersifat menentukan bagi terwujudnya stabilitas nasional, persatuan dan kerukunan, perdamaian dan ketenangan hidup, kehidupan beragama yang dinamis dengan terciptanya kerukunan umat beragama tentu saja membawa manfaat yang sangat besar. Untuk umat beragama terwujudnya kerukunan umat beragama mempunyai manfaat, minimal terjaminnya serta dihormatinya iman dan identitas mereka oleh pihak lain, dan maksimal adalah terbukanya peluang untuk membuktikan

keagungan agama mereka masing-masing dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[29]

Dalam pandangan pemerintah, melalui Menteri Agama RI, dinyatakan bahwa kerukunan hidup umat beragama merupakan "pilar beton tengah" bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang plural ini.[30] Sedangkan, upaya-upaya untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama di Sumatera Selatan itu telah ditempuh dengan berbagai cara, antara lain dengan dialog, musyawarah, diskusi, sarasehan, tatap muka, kunjungan silaturahmi, seminar para pemuka dan antar cendikiawan agama baik di daerah maupun di berbagai kecamatan. Serta,

---

[29]Moerdiono, *Makna Kerukunan Hidup Umat Beragama Menurut Tinjauan Paham Negara Kesatuan Republik Indonesia: Beberapa Pokok Pikiran*, Jakarta, Sarasehan Sehari Majlis Ulama Indonesia, 5 Nopember 1966.

[30]Tarmizi Taher, "Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia" dalam Mustoha (peny.), *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1997), hlm. vii-xi.

melalui kajian baik di tingkat doktrin, konsep atau gagasan maupun pada tingkat historis-sosiologis, pengalaman masing-masing antar umat beragama dalam kehidupan nyata dalam masyarakat.

Kehidupan beragama yang dinamis tercermin pada kerukunan hidup beragama yang mantap, otentik, dan produktif dengan pribadi-pribadi umat beragama yang matang dengan sikap moral otonom, kritis, dan terbuka. Tidak menutup diri dari dialog, baik itu dialog kehidupan, dialog teologis, dialog perbuatan, maupun dialog pengalaman agamis yang dilakukan secara terbuka dan lapang dada, serta saling menghormati perbedaan masing-masing.

Syarat untuk mencapai dialog antar umat beragama adalah dipenuhinya prasyarat dialog, seperti pelaku dialog yang mencapai kesadaran moral otonom, memegang prinsip etika universal,

memerhatikan setiap pola tindakan yang dilakukan, menciptakan kondisi dan situasi pembicaraan ideal dengan mengatasi segala macam hambatan, dan kemungkinan distorsi yang terjadi dalam komunikasi.[31]

Dialog antar umat beragama merupakan suatu bentuk komunikasi dan bagian penting untuk terbentuknya masyarakat komunikatif, apalagi terhadap masyarakat yang plural dengan agama yang plural. Untuk itu, pembentukan forum komunikasi seperti FKUB adalah sangat penting untuk terwujudnya masyarakat yang dialogis-agamis. Di samping itu, perlu pula mewujudkan ruang publik yang demokratis, bebas dari dominasi dan hegemoni satu pihak, di mana pelaku-pelaku kesadaran yang terbuka, matang, dan kritis dapat berperan dan

[31]Jürgen Habermas, *Communication and the Evolution of Society*, hlm. 208-209.

mengambil bagian dalam komunikasi yang interaktif.[32]

Dalam masyarakat plural, pluralitas agama maupun dalam kehidupan modern yang semakin plural, kehidupan secara kelompok dapat menjadi eksklusif dan orang mengambil jalan sesuai dengan pribadinya yang cenderung individualistik dan egois. Dalam menghadapi pluralisme seperti ini, pemikiran rekonstruksi pandangan moral yang bersifat universal praksis diperlukan dalam bentuk berupa klaim-klaim normatif universal yang tidak berat sebelah, seimbang di antara struktur-struktur interaksi sosial.

---

[32]Menurut Zimmermann, Habermas melintasi Karl Marx karena pemikirannya mengeni "skema sosialisasi kepribadian" yang tidak ada dalam Marx. Skema yang ada pada karya-karya awal Habermas itu merupakan konsep politik tentang "suatu diskusi yang bebas dominasi". Rolf Zimmermann, "Emancipation and Rationality: Foundational Problems in the Theories of Marx and Habermas", dalam *Ratio*, XXXVI, 1984, hlm. 2.

Dialog antar umat beragama merupakan bagian penting dari suatu bentuk proses komunikasi dalam mencapai cita-cita masyarakat komunikatif. Melalui teori tahapan moral Kohlberg dan Piaget, "setiap anggota masyarakat atau pelaku dialog dapat belajar untuk mencapai prasyarat yang diperlukan, sebagaimana setiap partisipan dapat belajar untuk mencapai pemahaman timbalbalik".

Terdapat alasan, atau yang melatarbelakangi perlunya dialog antar agama. Alasan-alasan tersebut, misalnya, fakta adanya pluralitas agama, keinginan berkomunikasi, pencapaian saling pengertian dan pertumbuhan, maupun penciptaan kerja sama dalam masyarakat.[33] Di Indonesia tidak hanya terdapat

[33]Mukti Ali, "Dialog dan Kerjasama Agama dalam Menanggulangi Kemiskinan" dalam Weinata Sairin (ed.), *Dialog Antar Umat Beragama: Membangun Pilar-pilar Keindonesiaan yang Kukuh* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), hlm. 14-16.

satu agama saja, melainkan beberapa agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Di samping itu, terdapat juga beberapa agama dan aliran kepercayaan lainnya. Karena itu, bila orang berbicara tentang suatu agama, maka tidak bisa tidak akan berhubungan dengan agama lainnya, dan memang di dalam kehidupan kita sehari-hari terjadi hubungan antara orang yang menganut berbagai agama.

Dewasa ini masyarakat Sumatera Selatan memiliki banyak kesempatan untuk berdialog satu sama lain. Kemudahan fasilitas transportasi memungkinkan banyak manusia melakukan migrasi. Begitu pula media massa setiap saat membawa informasi dari satu bagian dunia kepada lainnya. Kemudahan ini menjadikan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda, termasuk agamanya ingin saling mengenal, memahami dan diakui. Di sini dialog

antar agama seringkali membawa pelakunya untuk tumbuh dalam kepercayaannya sendiri jika ia berhadapan dengan orang yang memiliki kepercayaan lain. Seringkali kebenaran itu lebih baik disadari, labih jauh dipelajari, diperdalam, dihargai, dipahami, dan dihayati, ketika berhadapan dengan pandangan-pandangan lain. Perjumpaan antara pelbagai macam agama dapat memurnikan dan memerdalam keyakinannya sendiri.

Dialog antar umat beragama membantu untuk meningkatkan kerja sama antara pemeluk-pemeluknya, hingga dengan demikian secara bersama-sama kita dapat menegakkan kemanusiaan, keadilan, perdamaian, dan persaudaraan. Dialog akan mengatasi rivalitas, penindasan, kebencian, menciptakan harmoni dan menjauhkan sikap hidup yang saling menghancurkan. Dalam konteks ini, dialog antar

agama bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti dialog kehidupan, dialog kerja sosial, dialog antar monastik, dialog untuk do'a bersama (*istighasah*), dan dialog diskusi teologis.[34] Dialog kehidupan terjadi pada tingkat kehidupan sehari-hari, seperti yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, tanpa pembahasan secara formal, di mana setiap orang memerkaya dirinya dengan mengamati dan mencontoh praktik dan nilai dari pelbagai macam agama.

Dialog kerja sosial tampak dalam kerja sama pemeluk agama yang berbeda dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial untuk meningkatkan kualitas umat manusia dan membebaskan rakyat dari bebagai bentuk penderitaan, serta meningkatkan keadilan dan perdamaian. Dialog kerja sosial pada taraf teoritis juga bisa didahului

[34]Ali Mukti "Dialog dan Kerjasama Agama, hlm. 11-14.

oleh diskusi rasional dalam taraf etik. Anthony Giddens menjelaskan bahwa :

> *This ethical reasoning can be in the form of justice, and equality. Further, such might function as politics of life, which provides audience on how we should lead our life in dealing with existential problems*"[35]

Dialog antar monastik merupakan dialog antar umat beragama yang mengambil bentuk komunikasi seperti pengalaman agama, berdo'a, meditasi dan sebagainya. Dialog ini pada akhirnya bisa membawa kepada diskusi teologis. Dalam dialog untuk doa bersama, orang dari pelbagai macam agama berkumpul untuk doa bersama misalnya untuk perdamaian. Dengan dasar imannya masingmasing mereka berdoa sesuai dengan caranya sendiri-sendiri.

---

[35]Anthony Giddens, *Modernity and Identity, Self and Society in the Late Modern Age* (Cambridge: Polity Press and Blackwell Publishers, 1993), hlm. 208-231.

Dalam dialog teologi, ahli-ahli agama dari pelbagai macam agama tukar menukar informasi tentang kepercayaan dan amalan agama masing-masing. Diharapkan dalam dialog ini satu sama lain saling mengerti tentang persamaan dan perbedaan ajaran satu agama dengan lainnya, serta memerkaya keyakinan mereka masing-masing. Diskusi teologis juga dalam rangka memahami teologi tentang agama-agama, yang dapat dikembangkan melalui: praksis aksi dan kontemplasi, analisis sosial dan etik, serta interpretasi keyakinan dan tradisi keagamaan.[36]

Diskusi rasional pada taraf teologis dalam hubungan antar agama akhirnya akan membawa kepada prinsip setuju dalam hal yang tidak disetujui. Oleh Kreige dengan mendasarkan pada

[36]J.B. Banawiratna, "Theology of Religions" dalam *Religiosa: Indonesian Jurnal of Religious Harmony*, vol. 1, No. 2, April, Yogyakarta, 1995, hlm. 54-57.

Ludwig Wittgenstein tentang "permainan bahasa" (*languge game*) dan Peter Winch tentang kebudayaan masyarakat, prinsip *agreement in disagreement* dipahami sebagai sesuatu yang rasional dan tidak rasional yang bisa diterapkan bagi hubungan antara agama. Bagian dalam suatu agama yang termasuk rasional mungkin saja oleh agama lainnya masuk dalam bagian yang tidak rasional. Begitu pula sebalilknya. Sebagaimananya Kreige katakan:

> *This rational interreligion discussion should lead to a certain rational agreement among religions and at the same time should discover what is rational in one particular religion but is perceived as irrational in another*.[37]

Dialog antar agama di OKU Timur Sumatera Selatan bukan tanpa menemui kesulitan. Kesulitan-kesulitan tersebut misalnya

[37]David J. Kriege, *The New Universalism: Foundation for a Global Theology* (Maryknoll: Orbis Books, 1991), hlm. 120-123.

kesulitan dalam komunikasi, saling curiga, tiadanya perhatian dalam dialog, kesan sejarah, serta dialog dan dakwah.[38] Dialog merupakan suatu bentuk komunikasi, dan dalam dialog antar agama ini, bisa dijumpai kesulitan seperti misalnya kata-kata tertentu dalam suatu agama belum tentu menunjukkan arti yang sama bagi pemeluk agama lainnya. Karenannya, kata-kata yang diungkapkan harus diberi penjelasan, supaya tidak timbul salah pengertian.

Begitu pula bisa terjadi orang merasa curiga dengan diadakannya dialog antar agama, seperti kecurigaan bahwa dialog merupakan forum untuk mengalihkan keyakinan orang dari agamanya ke agama lain. Karena motivasi diadakan dialog, hendaknya dipahami benar-benar, sehingga kecurigaan seperti itu tidak perlu

[38] Mukti Ali, "Dialog dan Kerjasama Agama dalam Menanggulangi Kemiskinan", hlm. 16-18.

muncul. Tidak adanya perhatian terhadap dialog, karena adanya anggapan bahwa agamanya adalah telah sempurna, oleh karena itu tidak perlu lagi mengambil manfaat dari agama lain. Begitu pula anggapan bahwa dialog hanya diperuntukkan dan hanya bisa dilakukan kalangan tertentu saja.

Kesan sejarah berkaitan dengan adanya anggapan kepada suatu kelompok agama tertentu yang dikaitkan dengan penyebab terjadinya suatu pengalaman kehidupan bersama yang buruk. Begitu pula, kadangkala adanya anggapan bila dikaitkan dengan dakwah yang terdapat dan merupakan misi dalam setiap agama, akan timbul pesimisme terhadap dialog antar agama.

Kesulitan dan tantangan yang mungkin terdapat di dalam hubungan antar agama seperti yang dikemukakan di atas juga diungkapkan oleh Arinze seperti adanya kesan sejarah dari konflik yang pernah terjadi, adanya dominasi

kelompok agama tertentu yang mengklaim dan memertahankan kebenaran agamanya, maupun sikap-sikap fundamentalis yang tidak memberi ruang untuk mendengarkan kebenaran agama lainnya dan bahkan menunjukkan tindakan-tindakan kekerasan, serta ketidaktahuan tentang yang lain, tidak mengerti yang lain yang memudahkan tumbuh sikap ketidak-percayaan dan kecurigaan terhadap yang lain.

> *One the problems in inter religions is the impact of historical memories of conflict and misunderstandings. A second problems is that of group pressure, which can make a person want to please his group and show himself devout and zealous in defending it right. A third obstacle to dialogue is an extremist or fundamentalist attitude which makes a person violate the rights of another and even perform violent actions. Other obstacles dialogue can be mentioned. Ignorance of others is a problem woldwide. People who do not understand*

develop a suspicious, mistrustful attitude towards them.[39]

Dialog antar agama sebagai suatu bentuk dan proses komunikasi yang terjadi dalam masyarakat memang dapat mengalami berbagai macam hambatan kesulitan sebagaimana yang diungkapkan di atas. Kesulitan dan hambatan ini khususnya yang berkenaan dengan komunikasi dapat diatasi melalui teori tindakan komunikasi Jurgen Habermas, mengingat teori ini dimaksudkan sebagai dasar penciptaan masyarakat yang komunikatif, dan dialog antar agama sebagai proses komunikasi yang dicita-citakan

Hebermas mengemukakan prasyarat yang diperlukan bagi terjadinya suatu dialog yang bertujuan pencapaian saling pengertian dan

[39]Francis Cardinal Arinze, "Interreligious Dialogue and Harmony Today" dalam *Religiosa: Indonesian Jurnal of Religious Harmony*, vol. 1, No. 1, Agustus, Yogyakarta, 1995, hlm. 49-50.

pemahaman timbal balik. Di antara prasyarat tersebut adalah peserta dialog yang memiliki kualifikasi tertentu, di antaranya "terbuka", "matang" dan "kritis". Untuk itu, Habermas mencoba untuk menghubungkan diskursus etikanya dengan teori tindakan sosial melalui penyelidikan di dalam psikologi sosial mengenai moral dan perkembangan pribadi, dan ia memulainya dengan teori pentahapan moral Laurance Kohlberg.

> *The form this takes in present work is an attempt to connect discourse ethics to the theory of social action via an examination of research in the social psychology of moral and interpersonal development. Starting with Kohlberg's account of the development of moral judgement.*[40]

Habermas mengungkapkan teori perkembangan moral Laurence Kohlberg maupun teori perkembangan ego lainnya. Teori pentahapan

[40]Jürgen Habemas, *Moral Consciousness and Communicative Action*, hlm. ix.

moral itu dihubungkannya dengan teori tindakan komunikatif. Bagi Habermas, suatu dialog dalam diskursus etika adalah untuk mencapai saling pengertian, persetujuan yang rasional mengaitkan antara teori perkembangan ego, tahap kesadaran moral dengan teori tindakan komunikatif. Pokok-pokok teori tindakan komunikasi ini amat diperlukan bagi dialog antar agama khususnya dalam perspektif komunikatifnya.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Wilayah Studi

Mengingat fokus penelitian ini terletak pada sikap keagamaan yang berkembang di masyarakat secara dinamis, maka paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif sekaligus. Adapun alasan penggunaan paradigma kualitatif dan kuantitatif didasarkan pada beberapa alasan. *Pertama*, landasan ontologis yang dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah didasarkan pada kenyataan bahwa realitas sosial itu terkadang berwajah ganda sehingga interpretasi yang dihasilkan juga bersifat subyektif. *Kedua*, pemikiran, sikap, dan tindakan manusia itu bersifat integral dengan konteks sosialnya yang bersifat khusus dan lokal. *Ketiga*, penelitian kerukunan antar umat beragama lebih terfokus pada kisaran

discourse sebagai bagian dari produk pemikiran dan tingkah laku umat bergama yang dinamis. *Keempat*, penelitian ini menempatkan manusia sebagai instrumen utama sehingga memungkinkan dalam membuat pemetaan konsep terhadap beragam permasalahan yang diteliti.[41]

Adapun pendekatan studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teologi-keagamaan dan sosiologi-keagamaan. Pendekatan pertama (teologi-keagamaan) lebih memfokuskan pada kajian agama dalam kisaran doktrin-normatif. Sementara pendekatan kedua (sosial-keagamaan) lebih memfokuskan pada implikasi keberagamaan terhadap kehidupan sosial yang bekembang di mayarakat.

[41]Disadur dari Lexy J. Moleong. (cet. XIV). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 8 – 11

Sementara wilayah studi penelitian yang digunakan adalah "studi kontekstual". Noeng Muhadjir memberi tiga pengertian terhadap maksud studi ini: *pertama*, upaya pemaknaan menanggapi masalah kini yang umumnya mendesak; sehingga arti kontekstual sama dengan situasional. *Kedua*, melihat keterkaitan masa lampau-kini-mendatang. *Ketiga*, mendudukkan keterkaitan antara yang sentral dengan yang perifer.[42] Penggunaan wilayah studi kontekstual sangat dimungkinkan karena studi kerukunan antar umat beragama yang menjadi tema penelitian ini, berpijak pada persoalan-persoalan mendasar seputar: hubungan antar umat bergama yang menjadi realitas sosial.

[42]Uraian lebih rinci seputar "Studi Islam kontekstual" dapat dilihat dalam Noeng Muhadjir. (edisi IV). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin. 2000), hlm. 263 – 265

B. Sumber Data

Penelitian ini mendasarkan pada dua sumber data: primer dan sekunder. Sumber primer berkaitan langsung dengan berbagai konsep kerukunan antar umat beragama yang ada dan berkembang di OKU Timur, termasuk dalam kategori sumber primer adalah data-data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket, wawancara dan dokumentasi, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Sementara sumber sekunder berkaitan dengan berbagai pemikiran atau gagasan banding—baik langsung maupun tidak—yang memiliki relevansi dengan data primer, seperti pemikiran tentang hubungan antar umat beragama dan beberapa referensi yang memberi kontribusi bagi perkembangan kerukunan antar umat bergama di OKU Timur.

Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu

Penelitian ini dilakukan dengan sampel fokus penelitian lebih banyak menampilkan OKU Timur. Dengan pertimbangan bahwa OKU Timur dianggap sebagai tempat dengan pluralitas adat, etnik, dan agama cukup beragam di Sumatera Selatan. Adapun waktu penelitian dimulai dari Maret sampai dengan September 2012

Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Karena penelitian ini bersifat evaluatif terhadap pelaksanaan PBM, maka prosedur pengambilan data penelitian menggunakan data primer tentang kerukunan umat bergama di OKU Timur. Data diperoleh dari penyebaran angket, hasil wawancara, *face to face* dan diskusi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah.

Cara pengumpulan data,

Pengambilan data penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai beriut:

1. Penyebaran Angket

   Angket dianggap cukup efektif untuk menggali data, sehingga didapatkan data yang akurat, karena dilakukan langsung oleh peserta yang dipilih, dan diisi dengan cara yang jujur dengan memperhatikan kebutuhan penelitian.

2. Wawancara dan diskusi

   Wawancara (*interview/indept interview*) dan diskusi (*focus group discution*) dengan pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, penganut masing-masing agama akan dilakukan dilokasi penelitian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian yang sudah dibuatkan acuan pedoman wawancara.

Populasi dan sampel

Poulasi penelitian ini adalah masyakat OKU Timur yang terlibat dalam pelaksanaan PBM tahun 2006. Seperti pemerintah, tokoh agama, tokoh masyakat serta FKUB kabupaten, sedangkan untuk menghitung ukuran sampel menggunakan rumus sederhana sebagaimana yang digunakan Yamane[43] (1967:99 seperti dikutif dalam Rahmat). Oleh karena itu didasarkan pada proporsi populasi.

Dengan asumsi sasaran pelaksanaan PBM populasi dan sampel OKU Timur sebanyak 50 orang. Penentuan sampel penelitian dilakukan secara proporsional ramdom sampling, proporsi sampel didasarkan kepada jumlah pemeluk agama di wilayah penelitian yaitu OKU Timur.

[43]Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) , h.82

Validitas dan reliabilitas

Validitas menunjukkan bagaimana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Dalam penelitian ini menggunakan kuisioner, maka kuisioner yang digunakan harus mengukur apa yang ingin dievaluasi. Oleh karenanya, validitas alat pengumpul data yang digunakan adalah validitas isi, alat ini ditentukan oleh bagaimana alat pengukur tersebut mewakili semua aspek yang dianggap sebagai kerangka aspek

Sedangakan reliabilitas, merupakan indek penunjuk bagaimana suatu alat pengukur dapat dipercaya. Reliabilitas menunjukkan bahwa konsistensi suatu alat pengukur dapat mengukur gejala yang sama yang memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukur yang konsisten. Dalam pengukuran avaluasi terhadap gejala sosial seperti dalam penelitian ini, yang juga selalu

diperhitungkan adalah kesalahan pengukuran. Setiap hasil pengukuran sosial selalu merupakan kombinasi antara hasil pengukuran yang sesungguhnya ditambah dengan kesalahan pengukuran. Makin kecil kesalahan dalam pengukuran, maka makin reliabel alat pengukur tersebut, dan sebaliknya, makin besar kesalahan pengukuran tersebut, maka akan semakin tidak reliabel.

C. Analisis Data

Pada tahap analisis data, akan ditempuh dua proses. *Pertama,* editing, kategorisasi, dan tipologisasi data. Pada tahap editing, beberapa data yang terkumpul akan dipilah dan diperiksa berdasarkan relevansi dengan kajian yang diteliti. Tahap kategorisasi ingin mengelompokkan setiap data ke dalam unit-unit analisis berdasarkan kesesuaian antara satu tema dengan tema lainnya sehingga

menggambarkan keseluruhan analisis yang utuh. Sedang pada tahap tipologisasi, beberapa data yang sudah diproses pada tahap kategorisasi, akan dianalisis berdasarkan kecenderungan khusus dari data-data yang terkumpul, sehingga akan tergambar tipologi yang relatif komprehensif di dalamnya.

Sedang yang *kedua* akan dilakukan kontekstualisasi data. Dalam hal ini, data-data yang sudah diproses (diolah) pada tahap pertama, akan dianalisis berdasarkan keragaman konteks yang ada di balik data. Dalam konteks penelitian ini, tema pokok seputar kerukunan antar umat bergama di OKU Timur, Sumatera Selatan, dianalisis berdasarkan konteks evaluasi terhadap keagamaan (teologi) dan sosial-budaya. Dengan demikian, diharapkan data yang sudah dianalisis melalui proses kontekstualisasi ini, akan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap data-data penelitian yang ada di dalamnya.

BAB IV
GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Oku Timur

Kabupaten OKU Timur dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Sebelum menjadi daerah otonom, Kabupaten OKU Timur merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Secara geografis Kabupaten OKU Timur terletak 103^0 40′ Bujur Timur sampai dengan 104^0 33′ Bujur Timur dan antara 3^0 45′ sampai dengan 40 55′ Lintang Selatan dengan luas wilayah 3.370 km^2.

Dilihat dari ketinggian terhadap permukaan laut, maka Kabupaten OKU Timur

termasuk daerah yang berada di wilayah dataran rendah, dimana ketinggian maksimal dari permukaan laut hanya mencapai 67 meter, yaitu berada di sebagian wilayah Kecamatan Bunga Mayang dan Kecamatan Martapura. Selanjutnya jika dilihat dari derajat kemiringan tanah, maka pada umumnya Kabupaten OKU Timur memiliki dataran yang cenderung landai, dengan derajat kemiringan yang relatif kecil.

Seperti kebanyakan iklim di Indonesia, iklim Kabupaten OKU Timur terdiri atas iklim tropis dan basah. Pada Bulan Juni sampai September, arus angin lebih banyak berasal dari Australia yang tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau di Kabupaten OKU Timur. Sebaliknya pada Bulan Desember sampai dengan Maret, angin pada umumnya bertiup dari Asia dan Samudera Pasifik, yang melewati beberapa lautan, sehingga banyak

mengandung uap air, dan mengakibatkan terjadinya musim penghujan. Sepanjang tahun 2007, suhu udara rata-rata pada siang hari di Kabupaten OKU Timur berkisar antara 22^0 C - 31^0 C.

Pada awal terbentuknya kabupaten ini, wilayah Kabupaten OKU Timur terdiri atas 10 kecamatan dengan 204 desa dan 3 kelurahan. Pada tahun 2007 telah terjadi pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan. Kini jumlah kecamatan mencapai 20 kecamatan dan jumlah desa menjadi 269 desa serta jumlah kelurahan menjadi 7 kelurahan. Adapun batas wilayah Kabupaten OKU Timur adalah sebagai berikut; Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Sebelah Barat

berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan kondisi tersebut maka Kabupaten OKU Timur berada di wilayah bagian Selatan Provinsi Sumatera Selatan dan berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung bagian Utara. Jarak Kota Martapura (ibukota kabupaten) ke Kota Palembang (ibukota provinsi) sekitar 200 km atau sekitar 5 jam perjalanan darat dengan menggunakann kendaraan umum. Hampir di sepanjang wilayah Kabupaten OKU Timur dilalui oleh Sungai Komering. Sungai Komering memberikan keberkahan tersendiri bagi Kabupaten OKU Timur. Dengan adanya Sungai Komering, maka mulai jaman penjajahan Kolonial Belanja telah dibangun sarana irigasi teknis, yang Bendung Belitang. Kemudian pada awal tahun

1990-an Bendung Perjaya yang lebih modern juga telah dibangun oleh pemerintah RI.

B. Kondisi Demografis Kabupaten OKU Timur

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten OKU Timur jumlah penduduk Kabupaten OKU Timur dari tahun 2000-2007 mengalami laju pertumbuhan yang berfluktuasi. Penurunan laju pertumbuhan terjadi penduduk mulai tahun 2005, yaitu dari 1,28 persen pada tahun 2005, turun menjadi 1,20 persen tahun 2006, tapi pada tahun 2007 kembali naik sedikit hingga menjadi 1,21 persen. Jumlah penduduk Kabupaten OKU Timur sebesar 533.392 jiwa pada 2000, tahun 2003 menjadi 553.9 14 jiwa, tahun 2005 menjadi 570.990 jiwa, dan tahun 2007 menjadi 5 84.834 jiwa.

Persebaran penduduk di Kabupaten OKU Timur pada tahun 2007 menurut kecamatan

tampak tidak merata. Kecamatan Buay Madang Timur memiliki jumlah penduduk terbesar, mencapai 53.095 jiwa (9,08 persen), menyusul di urutan kedua Kecamatan Belitang I dengan jumlah penduduk 46.974 jiwa (8,03 persen) dan di tempat ketiga Kecamatan Martapura dengan jumlah penduduk 44.095 jiwa (7,54 persen).

Persebaran jumlah penduduk di Kabupaten OKU Timur tidak diiringi dengan kepadatan penduduk menurut kecamatan. Kecamatan Martapura sebagai ibukota kabupaten memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 431,63 jiwa/km^2, diikuti oleh Kecamatan Buay Madang dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 347,04 jiwa/km^2 dan berikutnya adalah Kecamatan Buay Madang Timur sebesar 339,81 jiwa/km^2. Adapun 3 kecamatan yang penduduknya masih jarang adalah Kecamatan Bunga Mayang (32,26

jiwa/km^2) dan Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja (5 1,41 jiwa/km^2).

Tabel Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Persebaran Penduduk Kabupaten OKU Timur, 2011

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km^2)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (%)
1. Martapura	44.095	102,16	431,63	7,54	3,03
2. Bunga Mayang	15.870	113,54	139,77	2,71	3,37
3. Jaya Pura	7.426	230,17	32,26	1,27	6,83
4. BP Peliung	28.964	154,13	187,92	4,95	4,57
5. Buay Madang	39.688	114,36	347,04	6,79	3,39
6. Buay Madang Timur	53.095	156,25	339,8 1	9,08	4,64
7. B P Bangsa Raja	9.920	192,95	51,41	1,70	5,73
8. Madang Suku II	28.395	129,34	2 19,54	4,86	3,84
9. Madang Suku III	20.093	195,32	102,87	3,44	5,80
10. Madang Suku I	34.652	211,25	164,03	5,93	6,27
11. Belitang Mdg Raya	36.783	163,59	224,85	6,29	4,85
12. Belitang I	46.974	354,50	132,51	8,03	10,52
13. Belitang Jaya	19.402	91,97	210,96	3,32	2,73
14. Belitang III	29.040	153,87	188,73	4,97	4,57
15. Belitang II	35.799	153,59	233,08	6,12	4,56
16. Belitang Mulya	19.193	45,97	417,51	3,28	1,36
17. Semendawai Suku III	36.981	297,77	124,19	6,32	8,84
18. Semendawai Timur	31.115	183,27	169,78	5,32	5,44
19. Cempaka	28.119	101,00	278,41	4,81	3,00
20. Semendawai Barat	19.230	225,00	85,47	3,29	6,68
Jumlah	**584.834**	**3370,00**	**173,54**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten OKU Timur (diolah)

C. Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten OKU Timur

Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten OKU Timur tahun 2011 meningkat dibandingkan tahun 2010. Tahun 2010 penduduk yang bekerja sebanyak 253.007 orang, sementara pada tahun 2011 meningkat menjadi 254.722 orang. Kondisi ini cukup menggembirakan karena sejalan dengan tujuan pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel Jumlah Penduduk Usia 10 tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha di Kabupaten OKU Timur tahun 2010-2011

Lapangan Usaha	2010		2011	
	Jumlah (Jiwa)	Persen	Jumlah (Jiwa)	Persen
Pertanian	202.788	80,13	203.207	79,78
Pertambangan dan	1.391	0,55	1.457	0,57
Industri Pengolahan	4.000	1,58	4.188	1,64
Listrik Gas dan Air	467	0,18	489	0,19
Kontruksi Bangunan	3.415	1,35	2.938	1,15
Perdagangan	29.200	11,54	30.117	**11,82**
Transportasi dan	5.422	2,14	5.631	**2,21**
Lembaga Keuangan	592	0,23	620	0,24
Jasa-jasa	5.802	2,29	6.075	2,38
JUMLAH	**253.077**	**100,00**	**254.722**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten OKU Timur (diolah)

Dari sisi sektoral tampak bahwa sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten OKU Timur terserap pada lapangan kerja primer. Pada tahun 2006 sebesar 80,13 persen penduduk bekerja di

sektor pertanian, sementara pada tahun 2011 terjadi pergeseran daya serap lapangan kerja. Akibatnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 2011 turun hingga menjadi 79,78 persen. Berbeda dengan sektor pertanian yang persentase penyerapan tenaga kerjanya menurun, pada sektor perdagangan justru terjadi peningkatan penyerapan relatif terhadap sektor lainnya. Jika pada tahun 2010 sebanyak 29.200 penduduk (11,54 persen) bekerja di sektor perdagangan, maka pada tahun 2011 meningkat menjadi 30.117 orang (11,82 persen).

Kondisi Sosial Keagamaan Kabupaten OKU Timur

Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, penduduk Kabupaten OKU Timur adalah Jawa, Sunda, Bali, Komering, Ogan,

Minang, dan lain-lain, sementara itu agama terbesar adalah agama Islam. Hampir 95 persen penduduk Kabupaten OKU Timur beragama Islam. Perkembangan agama Islam di Kabupaten OKU Timur tumbuh dengan baik, hal ini didukung oleh berkembangnya pondok pesantren hampir di setiap kecamatan.

Tabel Jumlah Pemeluk dan Rumah Peribadatan di Kab. OKU Timur Menurut Kelompok Agama dan Kepercayaan

Nama Agama	Jumlah		
	Pemeluk	Rumah Peribadatan	Prosentase
Islam	553.818	1.651	94,47
Protestan	5.461	66	0.93
Katholik	12.537	43	2.14
Hindu	13.632	49	2.33

Budha	770	10	0.13
Jumlah	526.218	1.819	100

Sumber: OKUT Dalam Angka Tahun 2011

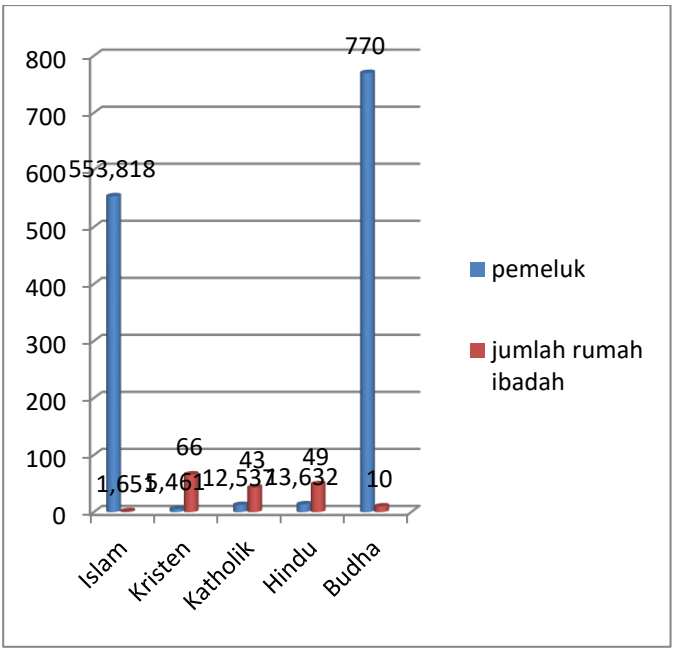

Salah satu Indikator ketaatan penduduk dalam menjalankan ajaran agama dapat dilihat dari besaran sarana ibadah yang ada. Data menunjukkan hampir semua rumah ibadah ada di Kabupaten ini, yaitu masjid sebanyak 654 buah,

musholla terdapat 977 buah, gereja terdapat 107 buah, pura terdapat 49 buah dan wihara terdapat 10 buah. Pada tahun 2011 jumlah jamaah haji Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebanyak 301 orang, terdiri dari 119 jemaah laki-laki dan 182 jemaah perempuan. Selain itu jumlah pernikahan yang tercatat di departemen agama pada tahun 2011 sebanyak 3.673 pernikahan.

Sebagai kabupaten yang areal wilayahnya cukup luas tentu mempunyai banyak permasalahan intern dan ekstern dalam berbagai hal dan salah satu diantaranya permasalahan keagamaan. Dengan segala kekuatan, kelamahan, peluang dan ancaman yang ada, Pemerintah Kabupaten Oku Timur dengan menerapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi yang tepat, bertekad untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam pembinaan keagamaan kepada masyarakat yang ada diwilayah kabupaten Oku Timur.

Masyarakat kabupaten Oku Timur yang majemuk, terdiri dari berbagai etnis, golongan dan agama. Di antara etnis terbesar adalah suku Komering sebagai masyarakat asli, etnis Jawa, Padang, Batak, keturunann China, India, Arab dan lain-lain. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Komering dan bahasa nasional Indonesia.

Tabel Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten OKU Timur Tahun 2008-2010

	Harapan Hidup (Tahun)	**Melek Huruf** (Persen)	**Lamanya sekolah** (tahun)	**Pengeluaran Riil per Kapita/bln** (000 Rp)
2008	67,8	90,9	6,3	573,0
2009	67,8	91,2	6,5	573,9
2010	68,1	94,5	6,8	587,5

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten OKU Timur (diolah)

Peningkatan kualitas hidup penduduk Kabupaten OKU Timur juga ditunjukkan oleh peningkatan angka melek huruf dari tahun 2008-2010. Pada tahun 2008 angka melek huruf di Kabupaten OKU Timur baru mencapai 90,9 persen, pada tahun 2009 meningkat menjadi 91,2 persen dan pada tahun 2010 mengalami lonjakan hingga mencapai 94,5 persen. Kondisi melek huruf merupakan *entry point* bagi penduduk dalam mengembangkan dan

meningkatkan taraf hidupnya. Peningkatan angka melek huruf di Kabupatn OKU Timur sejalan dengan angka lama sekolah seluruh penduduk Kabupaten OKU Timur. Jika pada tahun 2008 angka lama sekolah baru mencapai 6,3 tahun, maka pada tahun 2009 meningkat menjadi 6,5 tahun dan tahun 2011 meningkat kembali menjadi 6,8 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten OKU Timur telah mengikuti pendidikan pada jenjang SLTP.

Tingkat pengeluaran riil per kapita per bulan penduduk Kabupaten OKU Timur, yang merupakan *proxy* daya beli penduduk (*purchasing power parity*) juga mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2008 pengeluaran riil per kapita per bulan penduduk Kabupaten OKU Timur sebesar Rp. 573.000, pada tahun 2009 meningkat

menjadi Rp. 573.900 dan pada tahun 2010 meningkat kembali hingga mencapai Rp.587.500. Peningkatan pengeluaran riil penduduk merupakan sinyal yang baik guna menggapai tujuan pembangunan yaitu tercapainya masyarakat yang makmur dan sejahtera.

D. Kondisi Ekonomi Kabupaten OKU Timur

Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi dapat menggambarkan kemajuan suatu daerah. Semakin maju perekonomian suatu daerah maka kontribusi sektor primer cenderung mengalami penurunan sedangkan kontribusi sektor sekunder dan sektor tersier menunjukkan peningkatan. Di Indonesia struktur ekonomi biasanya dilihat dengan pendekatan makro sektoral, yaitu berdasarkan kontribusi sektor

ekonomi terhadap pembentukan PDRB. Secara makro sektoral, perekonomian Kabupaten OKU Timur masih mengandalkan potensi sektor pertanian. Hal ini tercermin dari kontribusi sektor pertanian yang lebih dari 50 persen selama tahun 2000 sampai 2007. Namun jika dilihat polanya maka secara berangsur ketergantungan perekonomian Kabupaten OKU Timur terhadap sektor pertanian mulai berkurang. Pada awal pembentukan kabupaten ini (2003), sektor pertanian mampu menyumbang 52,30 persen PDRB, tahun 2008 mengalami peningkatan menjadi 5 2,49 persen dan selanjutnya pada tahun 2009, 2010 dan 2011 mengalami penurunan mulai dari 5 1,75 persen, turun menjadi 51,21 persen dan turun lagi hingga menjadi 50,84 persen dari PDRB agregat.

Pergeseran dominasi sektor pertanian secara perlahan yang mulai terjadi pada tahun 2009 tersebut, berimplikasi pada peningkatan kontribusi sektor ekonomi lainnya. Sektor kedua yang paling berperan dalam penciptaan PDRB Kabupaten OKU Timur adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun 2000 sektor ini mampu menyumbang sebesar 14,19 persen dari PDRB agregat, selanjutnya pada tahun 2001 turun hingga menjadi 13,24 persen, tahun 2002 turun lagi menjadi 12,70 persen, tetapi pada tahun 2003 mulai meningkat menjadi 12,73 persen. Pada tahun 2009 kontribusi sektor ini terus meningkat yaitu sebesar 13,20 persen, tahun 2010 meningkat menjadi 14,01 persen dan tahun 2011 meningkat kembali hingga menjadi 14,74 persen. Kondisi ini tidak terlepas dari Kabupaten OKU Timur sebagai daerah

pemekaran baru yang mengalami penataan berbagai sektor ekonomi dan pemerintahan. Pusat-pusat akitifitas perdagangan bertumbuh mulai dari Kota Martapura, kawasan Gumawang, kawasan Sri Wangi dan Cempaka. Hal ini merupakan implikasi dari kondisi Kabupaten OKU Timur sebagai daerah otonom baru yang mulai membangun.

Sektor ekonomi lainnya yang cukup berperan besar dalam perekonomian Kabupaten OKU Timur adalah sektor jasa-jasa. Sejak tahun 2003 sektor ini mengalami peningkatan peran dalam penciptaan PDRB Kabupaten OKU Timur. Pada tahun 2003 sektor ini memiliki kontribusi sebesar 11,10 persen, kemudian di tahun 2004, 2005, dan 2006 terus mengalami peningkatan kontribusi yaitu menjadi 11,56 persen, 11,62 persen dan 11,63 persen. Namun pada tahun 2007 kontribusi

sektor ini mengalami sedikit penurunan hingga menjadi 11,60 persen. Sementara itu, sektor-sektor ekonomi lainnya hanya memiliki peran di bawah 10 persen dalam penciptaan PDRB agregat.

Jika ditinjau berdasarkan subsektor maka kondisi perekonomian di Kabupaten OKU Timur tidak menunjukkan perbedaan jika dibandingkan secara sektoral. Hal ini disebabkan bahwa kegiatan ekonomi dominan yang diklasifikasikan per subsektor pun merujuk pada subsektor turunan dari sektor ekonomi yang dominan pula. Berdasarkan subsektor maka subsektor tanaman bahan makanan mampu menyumbang 25,3 8 persen (tahun 2000) dalam pembentukan PDRB di Kabupaten OKU Timur. Walaupun perannya dalam pembentukan PDRB Kabupaten OKU

Timur dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan, namun subsektor ini tetap merupakan subsektor yang paling berperan dalam penciptaan PDRB di Kabupaten OKU Timur.

Subsektor tanaman perkebunan juga turut berperan besar dalam perekonomian Kabupaten OKU Timur. Subsektor ini mampu menyumbang 15,78 persen dalam penciptaan PDRB pada tahun 2000. Di tahun-tahun berikutnya kontribusi subsektor ini terus mengalami peningkatan, terutama mulai tahun 2003 hingga 2007. Secara berturut-turut kontribusi subsektor ini adalah sebesar 16,93 persen (2003), 18,31 persen (2004), 18,95 persen (2005), 19,62 persen (2006) dan 20,54 persen (2007). Jika melihat fenomena perkembangan peran subsektor ekonomi di Kabupaten OKU Timur

dalam kurun waktu tahun 2000 sampai 2007 ini, bukan tak mungkin beberapa tahun ke depan dominasi subsektor tanaman bahan makanan akan tergeser oleh subsektor tanaman perkebunan, terlebih harga karet dan CPO dunia belakangan ini mengalami perbaikan cukup signifikan. Kondisi tersebut menjadikan petani karet dan kelapa sawit di Kabupaten OKU Timur semakin bergairah membudidayakan tanaman karet dan kelapa sawit.

Subsektor lain yang turut berperan penting dalam perekonomian di Kabupaten OKU Timur adalah subsektor perdagangan. Peranan subsektor ini sempat mengalami penurunan pada tahun 2000 hingga 2002. Namun mulai tahun 2004 hingga 2007 peran subsektor ini mengalami peningkatan secara pasti. Secara berturut-turut peran subsektor ini dalam

pembentukan PDRB Kabupaten OKU Timur sebesar 11,72 persen (2004), 12,42 persen (2005), 13,26 persen (2006) dan 14,01 persen (2007).

Dominasi kegiatan ekonomi pada subsektor perdagangan, subsektor tanaman bahan makanan dan subsektor tanaman perkebunan memiliki keterkaitan yang erat. Keterkaitan ini dapat dijelaskan bahwa meningkatnya peran perdagangan di Kabupaten OKU Timur tak terlepas dari peningkatan peran pengusahaan tanaman bahan makanan dan tanaman perkebunan, karena input terbesar dalam penghitungan Nilai Tambah Bruto subsektor perdagangan di Kabupaten OKU Timur adalah output dari sektor pertanian (BPS, 2004). Oleh karena itu kegiatan pertanian di Kabupaten OKU Timur

memiliki *"forward linkages"* yang besar bagi subsektor perdagangan.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten OKU Timur sempat mengalami penurunan pada tahun 2003. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2003, yaitu dari 4,93 persen pada tahun 2002 menjadi 4,60 persen pada tahun 2003. Penurunan pertumbuhan ekonomi di tahun 2003 ini sangat dipengaruhi oleh penurunan hasil produksi (output) sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan dan sektor keuangan. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut tergambar pada penurunan pertumbuhan PDRB dari masing-masing subsektornya.

Pertumbuhan ekonomi yang sempat melambat di tahun 2003 ternyata tidak terjadi di tahun-tahun berikutnya. Perekonomian Kabupaten OKU Timur pada tahun 2004 hingga 2007 menunjukkan kinerja yang membaik. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,39 persen (2004), 5,72 persen (2005), 6,49 persen (2006) dan 6,70 persen (2007). Selama kurun waktu tersebut pertumbuhan ekonomi Kabupaten OKU Timur menunjukkan *trend* yang meningkat.

Selanjutnya jika melihat Tabel 4.5 lebih rinci secara sektoral, pada tahun 2007 sektor yang mengalami pertumbuhan paling besar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang tumbuh sebesar 9,73 persen, kemudian disusul oleh sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh sebesar 8,87

persen dan sektor bangunan yang tumbuh sebesar 6,77 persen.

Dari berbagai deskripsi di atas maka dapat dinyatakan bahwa selama 7 tahun (2005-2011) Kabupaten OKU Timur mengalami pertumbuhan ekonomi dengan laju rata-rata 6,31 persen. Selama periode tersebut, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertanian memiliki rata-rata pertumbuhan yang paling besar dibandingkan sektor ekonomi lainnya. Dalam kurun waktu tersebut sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 12,46 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 9,64 persen dan sektor pertanian sebesar 6,30 persen.

Pendapatan per Kapita

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya menunjukkan peningkatan output produksi atau tingkat pendapatan secara makro, tapi pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi laju pertumbuhan penduduk yang pesat dapat menjadi sinyal peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui indikator pendapatan per kapita.

Jika dihitung atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, maka pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten OKU Timur selama tahun 2005-2011 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten OKU Timur hanya sebesar Rp. 2.7 12.601, delapan tahun kemudian, yaitu pada tahun 2011 telah meningkat

menjadi Rp. 6.426.218. Ini berarti selama tahun 2005-2011 rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten OKU Timur adalah sebesar 19,56 persen setiap tahunnya. Sementara bila dihitung atas dasar harga konstan, pendapatan per kapita di Kabupaten OKU Timur pada tahun 2005 sebesar Rp. 2.7 12.601 dan pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 3.543.886. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2005-2011 telah terjadi rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita sebesar 4,38 persen setiap tahunnya.

BAB V
EVALUASI
TERHADAP PELAKSANAAN PBM TAHUN 2006 DI OKU TIMUR SUMATERA SELATAN

Dalam melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Tahun 2006 tentang KUB di OKU Timur, peneliti menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. Hal ini dilakukan untuk melihat dan menilai sejauh mana strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten dan Kementerian Agama, maupun tokoh masyarakat baik yang terlibat dalam kepengurusan FKUB maupun yang tidak terlibat sejak peraturan ini diterapkan untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama di daerah.

Pelbagai aspek untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan PBM diharap mampu memberikan gambaran tentang pelaksanaan yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Hal ini menjadi penting, mengingat aturan yang berkaitan dengan KUB tidak boleh berlaku semu, akan tetapi secara substansi harus menyentuh mulai dari lembaga-lembaga pemerintahan sampai kepada kelompok keagamaan, atau bahkan mungkin sampai kepada masyarakat paling bawah. Dengan demikian, maka hubungan keberagamaan masing-masing umat akan dapat berjalan sesuai dengan tuntunan agamanya masing-masing. Peneliti menilai inilah esensi mengapa pemerintah melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Tahun 2006 ini dikeluarkan. Wajar saja kemudian kalau aturan ini perlu dilakukan evaluasi, dan jika perlu, dilakukan evaluasi sampai ke semua daerah. OKU Timur yang menjadi pilihan

peneliti kali ini, tidak terlepas dari kondisi wilayahnya yang sangat majemuk. Paling tidak kemudian bisa menjadi sampel untuk evaluasi di wilayah propinsi Sumatera Selatan. Oleh karen itu, peneliti merasa perlu untuk menampilkan data-data kuantitatif dan kualitatif guna memudahkan dalam melakukan evaluasi.

A. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini dilihat dari unsur usia, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, keikutsertaan dalam pelaksanaan PBM. Secara kuantitatif karakteristik responden dapat dibaca pada tabel berikut.

Tabel Rataan Karakteristik Responden

No	Karakteristik	Satuan
1	Rataan usia (th)	35.64583 th
2	Pendidikan SD	 -

	SLTP SLTA S1 S2 S3	- 11 (22.92%) 34 (70.83%) 2 (4.17%) -
3	Jenis kelamin Laki-laki Perempuan	 39 org (81,25%) 9 org (18,75%)
4	Pekerjaan PNS Swasta	 27 (56.25%) 21 (43.75%)
5	Posisi/keikutsertaan dalam PBM Ikut serta Tdk ikut	 32 (66.67%) 16 (33.33%)

1. Rata-rata umur responden adalah 35 tahun yang berarti responden umumnya termasuk dalam katagorisasi umur produktif, namun mendekati umur yang memiliki resestensi yang cukup terhadap hal-hal yang berkaitan dengan PBM, dengan demikian, responden memenuhi sasaran pelaksanaan PBM dan dianggap

cukup mampu dalam menyerap pengetahuan tentang PBM. Pemahaman yang memadai diharapkan dapat disebarluaskan kepada anggota masyarakat secara benar. Sehingga PBM akan tersebar luas dalam masyarakat dalam waktu yang cukup memadai.

2. Rata-rata pendidikan responden adalah Strata 1 (S1) yang berarti bahawa mereka telah mengenyam pendidikan tinggi. Pendidikan sasaran pelaksanaan PBM yang cukup tinggi memungkinkan pemahaman sasaran pelaksanaan PBM cukup baik. Pemahaman yang cukup baik tersebut diharapkan menjadi modal bagi responden dalam menyebarluaskan pengetahuannya tentang PBM kepada anggota masyarakat di sekitarnya

3. Responden sebagaian besar (81,25%) adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan masih perlu ditingkatkan, mengingat populasi penduduk negara kita lebih dari 50% adalah perempuan. Keseimbangan responden berdasarkan jenis kelamin akan dapat meningkatkan efektifitas proses pelaksanaan PBM di dalam masyarakat
4. Rata-rata pekerjaan responden terdiri dari mereka yang bekerja di instansi pemerintah sebanyak 27 (56.25%), sedangkan sisanya sebanyak 21 (43.75%) adalah swasta yang kalau dilihat dari penghasilan masing-masing mereka rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,/bulan. Hasil ini menunjukkan secara personal sasaran pelaksanaan PBM termasuk dalam kelas

menengah. Kondisi tersebut memungkinkan mereka tidak menghadapi kendala ekonomis dalam keperluan pelaksanaan KUB dalam masyarakat

5. Rata-rata responden adalah tokoh agama yang telah mengikuti sosialisasi PBM, dan umumnya terlibat dalam kepengurusan FKUB, maupun yang tidak terlibat dalam kepenguruasan. Pengetahuan mereka tentang KUB dianggap baik, hal ini mendukung pemahaman bahwa pelaksanaan PBM di OKU Timur berjalan cukup baik.

B. Tingkat Pengetahuan tentang PBM

1. Pengatahuan masyarakat OKU Timur tentang PBM

   Masyarakat yang menjawab "tahu" sebanyak 28 orang (58,33%)

   Sedangkan sisanya tidak mengetahui tentang PBM. Data ini menunjukkan bahwa responden yang mengetahui tentang adanya PBM lebih banyak dari yang tidak tahu. Akan tetapi perbedaannya tidak terlalu signifikan. Dengan demikian, kadar pengetahuan tidak terlalu berpengaruh terhadap pemeliharaan kerukunan

2. Pentingnya kerukunan umat beragama

   Dari jawaban responden seluruhnya menjawab "penting" terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama. Hal ini menunjukkan bahwa

masyarakat OKU Timur sangat mementingkan terjaganya kerukunan antar umat beragama terlihat dari apresiasi mereka dalam menjawab pertanyaan hampir semua responden menghendaki agar kerukunan umat beragama terjaga dengan baik

3. Pengetahuan masyarakat terhadap organisasi kemasyarakatan (ORMAS) keagamaan

   Jawaban responden menunjukkan bahwa hampir seluruh responden mengetahui ormas keagamaan (95,83%). Jawaban yang manarik bahwa hampir semua responden mengetahui tentang adanya organisasi kemasyarakatan keagamaan, menunjukkan bahwa masyarakat OKU Timur mengetahui atau terlibat dalam organisasi keagamaan,

sehingga kehidupan keberagamaan mereka dapat diorganisasi dengan baik oleh tokoh agamanya masing-masing. Peran tokoh agama dalam hal ini untuk menjaga kerukunan sangat signifikan. Masyarakat senantiasa mengikuti arahan pemuka agamanya masing-masing dalam hal menjaga kerukunan. Perbedaan dikemas dalam balutan pesan agama dengan baik, sementara hal-hal yang mungkin memiliki semangat kebersamaan dapat dilakukan bersama-sama dalam melakukan gotong royong dan lain-lain.

Pengetahuan responden tentang PBM masih berada dalam rentang katagorisasi cukup sampai baik, sehingga perlu ditingkatkan menjadi amat baik. Hal ini dimaksudkan

agar mesyarakat lebih teliti dalam mengidentifikasi masalah yang menjadi penyebab menurunnya kerukunan beragama dalam masyarakat serta solusinya. Hal ini pula disebabkan antara lain masih kurangnya sosialisasi tentang materi PBM. Pengetahun PBM merupakan salah satu indikator tingkat penguasaan PBM yang selanjutnya akan menjadi modal dalam proses penyebarluasan informasi kepada masyarakat disekelilingnya. Oleh karena itu, perlu diupayakan peningkatan daya serap PBM selama atau setelah kegaiatan sosialisasi. Peningkatan tersebut dapat dilakukan misalnya melalui sosialisasi yang inten, pelaksanaan diskusi terkait kasus-kasus kerukunan umat bergama.

C. Derajat Sikap terhadap PBM

No	Objek	Skor		
		SS	S	TS
1	Adanya syarat ketika pendirian rumah ibadah	34	14	-
2	Pendirian rumah ibadah agama minoritas	32	16	-
3	Pendirian rumah ibadah agama lain	28	20	-
4	Penggunaan bangunan non rumah ibadah Untuk rumah ibadah	-	14	34
5	Kewenangan bupati dalam perizinan rumah ibadah	32	16	-
6	Keberadaan FKUB	37	1	-
7	Kepemimpinan agama mayoritas dalam FKUB	26	22	-
8	Keanggotaan agama mayoritas dalam FKUB	25	23	-

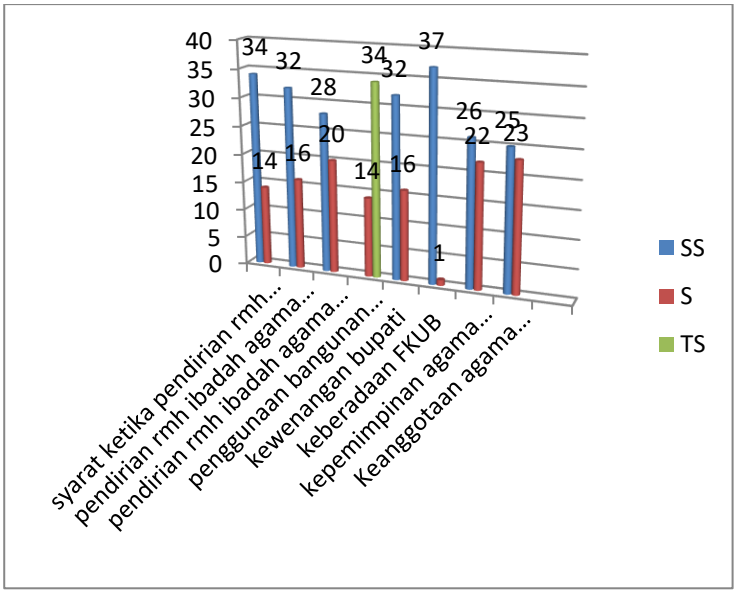

Dari tabel ini diketahui bahwa yang perlu diperhatikan, yaitu sikap tidak setuju responden terhadap memungsikan bangunan nonrumah ibadah sebagai rumah ibadah. Sikap tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sepenuhnya belum dapat menerima cikal bakal pendirian rumah ibadah di wilayahnya apabila ada penganut agama yang minoritas. Hal ini dapat

dipahami karena selama ini masyarakat menaganggap bahwa rumah ibadat dianggap sebagai simbol keberadaan kelompok mayoritas agama di suatu wilayah. Ketidaksetujuan masyarakat terhadap pemanfaatan bangunan non rumah ibadah untuk rumah ibadah ini dilatarbelakangi oleh seringnya terjadi penyalahgunaan oleh sekelompok agama tertentu, sementara sebagian masyarakat sekitar menghendaki peraturan dipatuhi. Masalah tersebut timbul karena beberapa faktor; masih relatif kuatnya fanatisme keagamaan kelompok, kurangnya wawasan multikultural, dan terbatasnya kegiatan kerjasama sosial lintas kelompok keagamaan. Sementara itu sikap yang menyetujui terhadap kepemimpinan agama mayoritas dalam FKUB dan keanggotaan

agama mayoritas dalam FKUB. Kondisi seperti ini dianggap sebagai kepahaman mereka tentang kondisi yang sesungguhnya, bahwa untuk menghindari kesalahpahaman dalam hal asas keterwakilan, maka sudah selayaknya agama mayoritas menjadi pemimpin, meskipun tidak boleh dimutlakkan, tetapi tetap harus dilakukan prosesnya secara demokratis dalam proses pemilihan. Hal ini dapat digunakan sebagai pelajaran dalam hidup bermasyarakat yang didahului dengan proses demokratisasi dalam FKUB. Kesetujuan mereka terhadap keaganggotaan agama mayoritas dala FKUB menjadi salah satu penguatan tentang perlunya peraturan bupati atau lainnya yang menjelaskan tatacara penentuan perwakilan masing-masing penganut agama dalam keanggotaan FKUB.

D. Desiminasi Informasi

Kegaiatan diseminasi informasi oleh peserta kepada masyarakat tentang kewenangan kepala daerah dalam hal kerukunan umat beragama, FKUB, prosedur dan syarakat pendirian rumah ibadat, prosedur dan syarat penggunaan bangunan nonrumah ibadat, serta penyelesaian perselisihan akibat pendirian rumah ibadat dilakukan secara tidak teratur

No	Objek	Skor		
		SS	S	TS
1	Kewenangan kepala daerah	32	16	-
2	FKUB	34	14	-
3	Prosedur dan sayarat pendirian rumah ibadah	32	16	
4	Prosedur dan syarat penggunaan bangunan nonrumah ibadat	-	14	34

5	Penyelesaian perselisihan akibat pendirian rumah ibadah	33	15	-

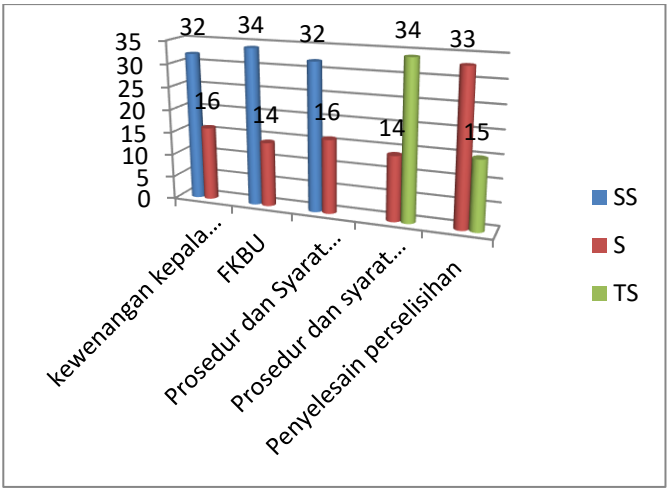

Tabel di atas menunjukkan adanya kaitan dengan pemahaman mereka tentang pengetahuan mereka terhadap aturan PBM, responden telah mengetahui PBM dari sosialisasi yang dilakukan oleh FKUB, sehingga pasca sosialisasi, atau penjelasan dari para tokoh agama mereka masing-

masing, sehingga mereka telah memiliki kesadaran yang cukup baik.

E. Peraturan Bupati tentang PBM

Keberadaan peraturan dan kesesuaian peraturan dalam pelaksanaan PBM, serta kemampuan peraturan dalam memeliharan KUB di OKU Timur sudah cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa respon pemerintah daerah tentang pelaksanaan PBM perlu terus dijaga atau bahkan mungkin perlu terus ditingkatkan. Namun demikian, meskipun belum ada peraturan yang secara konkret atau terkait langsung dengan PBM, namun karena masyarakat OKU Timur terus mendapatkan perhatian dari tokoh agama serta pemerintah kabupaten, maka sikap proaktif tokoh masyakat bersama pemerintah dianggap berperan dalam

menjaga KUB. Akan tetapi, menjadi lebih baik lagi apabila dalam rangka usaha preventif demi terus menjaga KUB di daerah OKUT, menjadi tidak salah kalau dibuatkan sejak awal peraturan yang berkaitan khusus dengan PBM. Hal ini terlihat dalam tabel berikut:

No	Objek	Skor		
		SS	S	TS
1	Keberadaan peraturan bupati	44	4	-
2	Kesesuaian peraturan bupati dengan PBM	40	8	-
3	Kemampuan peraturan Bupati dalam pemeliharaan KUB	43	5	

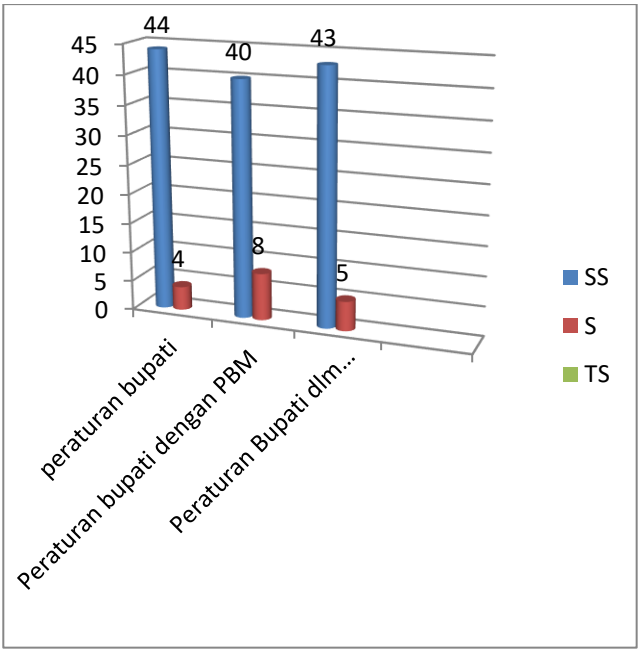

F. Peran Pemkab dalam KUB

Peran dan dukungan sumber daya dari pemerintah daerah pada umumnya berada dalam katagori telah berperan sangat baik dalam memelihara KUB, termasuk di dalamnya peran Kemenag. Dengan demikian, maka Pemkab dan Kemenag OKU Timur hendaknya tetap mengalokasikan

sumber daya (manusia, finansial, material, sosial alamiah) untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama. Terkait dengan program kerukunan, Kemenag sejauh ini telah melakukan berbagai kegiatan musyawarah intern dan antar umat beragama serta program kerukunan lainnya. Dukungan yang masih perlu ditingkatkan terutama dukungan sumberdaya dari pemerintah Kabupaten. Untuk itu, yang selam ini telah dilakukan hendaknya tetap diteruskan untuk memberikan dukungan yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan PBM, karena semua aparat pemerintah daerah di kabupaten adalah pelayan masyarakat yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang ada di daerahnya. Apabila masyarakat setempat mempersoalkan eksistensi PBM,

maka aparat pemerintah di daerah seharusnya dapat menyelesaikan persolan tersebut. Hal ini dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel Peranan Pemkab dalam KUB

No	Objek	Skor		
		SS	S	TS
1	Dukungan sumber daya dari Pemkab	40	8	-
2	Dukungan sumber daya dari kantor Kemenag kabupaten	41	7	-
3	Peran Pemkab dalam dalam pemeliharaan KUB	45	3	-
4	Peran kantor Kemenag kabupaten dalam pemeliharaan KUB	44	4	-

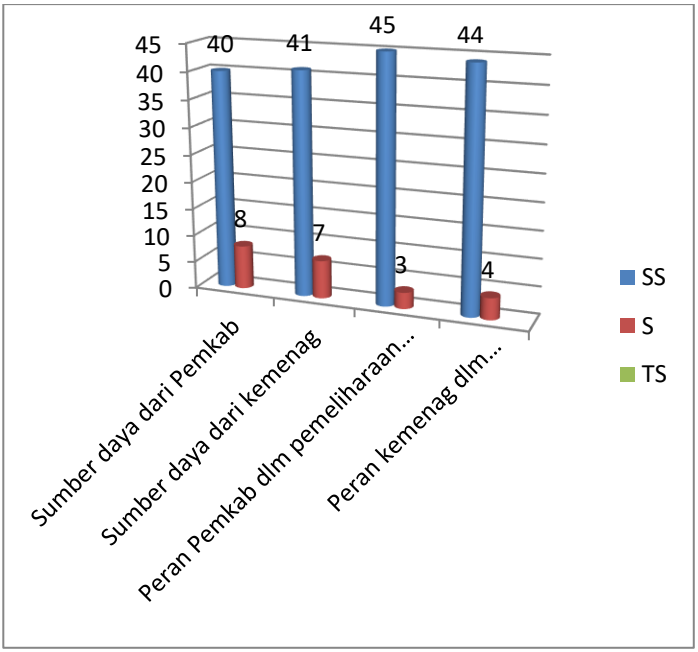

Sebagaimana diketahui bahwa PBM disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, bahwa Menteri Dalam Negeri adalah atasan langsung Gubernur dan Bupati, oleh karenanya Bupati mesti mengikuti peraturan Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian semua staf atau aparat pemerintah di daerah harus

sejalan dalam memahami dan menyukseskan pelaksanaannya di masyarakat agar tercipta kerukunan umat beragama di wilayahnya.

G. Peran Kelompok Agama dalam KUB

Kelompok pemuka agama selama ini telah berperan psitif dalam memelihara KUB.

no	Objek	Skor		
		SS	S	TS
1	Peran kelompok agama dalam pemeliharaan KUB	42	6	-
2	Peran tokoh agama dalam pemeliharaan KUB	44	4	-

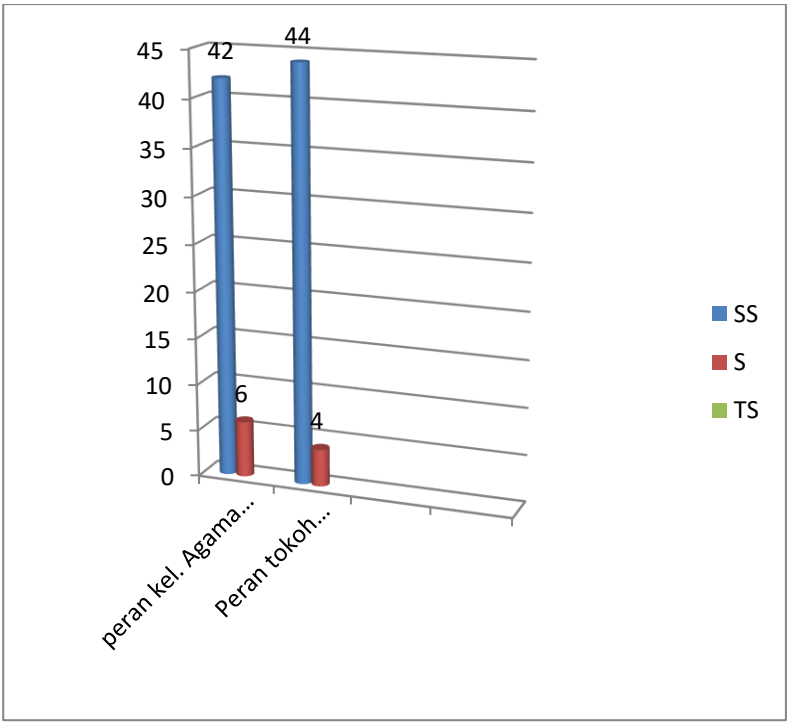

Kelompok agama sebagai lembaga yang menaungi umat beragama sudah menjalankan fungsi dan peranannya dalam memelihara kerukunan umat beragama. Kondisi ini harus dipertahankan dan diusahakan untuk lebih meningkat lagi, agar kondisi kerukunan umat beragama dapat

tetap terwujud dengan baik, meskipun permasalahan masyarakat di masa yang akan datang akan semakin kompleks.

H. Dinamika FKUB

Forum Kerukunan umat Beragama (FKUB), sebagai lembaga yang mempresentasikan seluruh umat beragama di suatu wilayah sudah seharusnya mampu mendorong umat beragama untuk berprilaku saling menghargai dan terbinanya toleransi antar umat beragama, sehingga keharmonisan kehidupan umat beragama dapat tercipta. Namun demikian, dinamika kehidupan masyarakat menuntut dinamika FKUB dalam menyikapi dan mengatasi semua kemungkinan permasalahan yang timbul sewaktu-waktu. Hasil penelitian terhadap FKUB misalnya terlihat:

No	Objek	Skor		
		SS	S	TS
1	Kerjasama FKUB kabupaten	43	5	-
2	Pelaksanaan tugas FKUB kabupaten	42	6	-

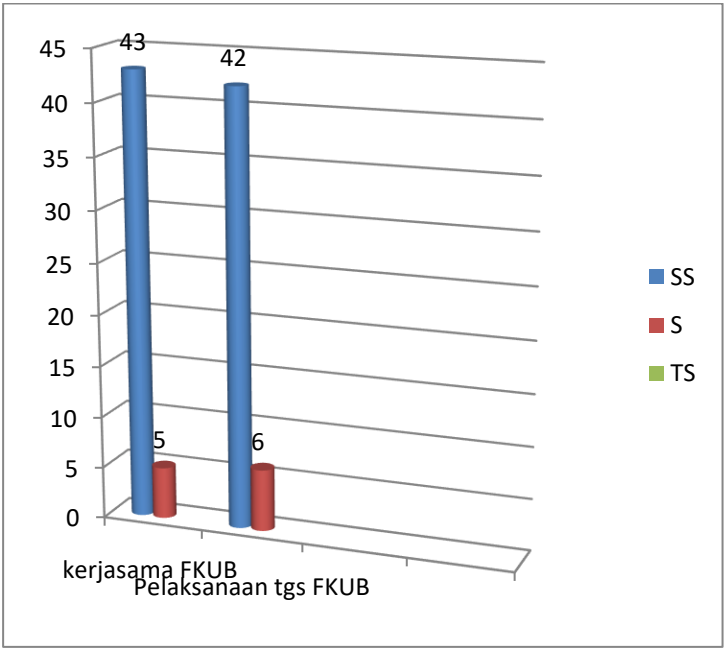

FKUB OKU Timur dinilai telah dapat melaksanakan kerjasama dan mempunyai program kerja yang dapat memelihara KUB, sudah dapat melaksanakan tugasnya secara

lebih menyeluruh. Hal ini berarti dari kekuatan internal dan perencanaan telah cukup baik, yang harus ditingkatkan adalah proses eksekusi dari rencana program tersebut, sehingga FKUB dapat melaksanakan semua tugas-tugasnya secara baik sesuai dengan PBM. Memaksimalkan peran FKUB dapat dilakukan dengan memperbanyak aktivitas kepengurusan setelah terbentuk, kemudian melakukan pertemuan secara rutin, sehingga kalau ada permasalahan dapat dideteksi sejak dini.

I. Pemenuhan syarat dalam Mendirikan Rumah Ibadah

Dalam kehidupan keberagamaan di Indonesia, pengalaman yang ada menunjukkan bahwa masalah mendirikan rumah ibadah merupakan sesuatu yang

sangat sensitif dan sering kali menjadi pemicu terjadinya konflik. Oleh karenanya pemahaman masyarakat dan aparat pemerintah terhadap syarat pendirian rumah ibadah menjadi sesuatu yang mutlak. Hasil penelitian terhadap pemenuhan syarat pendirian rumah ibadat terlihat sebagai berikut:

No	Objek	Skor		
		SS	S	TS
1	Derajat kepahaman masyarakat tentang syarat	28	20	-
2	Derajat kepahaman aparat tentang syarat	29	19	-
3	Keamampuan pemenuhan syarat	25	23	-
4	Kesesuaian pendirian rumah ibadah dengan PBM	28	20	-

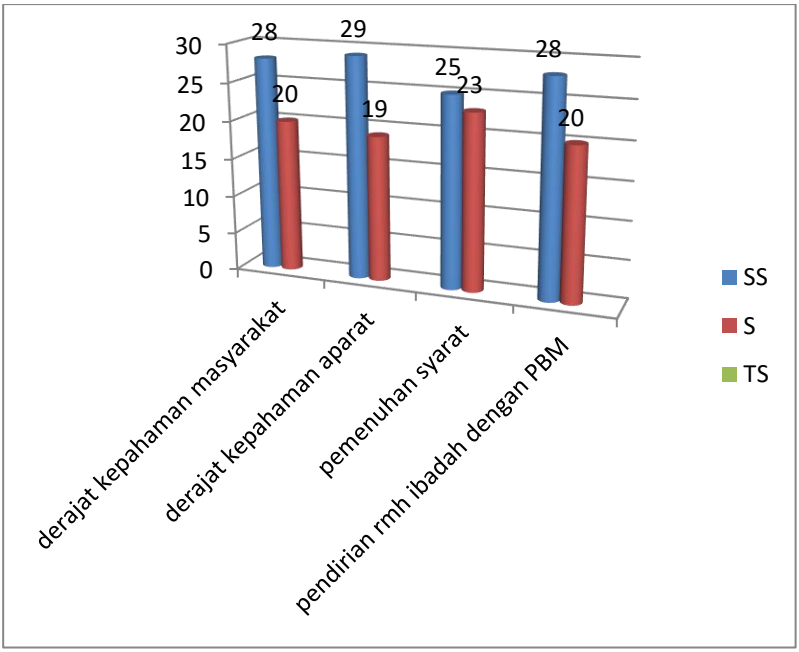

Tabel di atas menunjukkan bahwa perhatian masyarakat sudah cukup baik dalam memenuhi persyaratan untuk mendirikan rumah ibadat. Masyarakat sudah menyadari pentingnya untuk mengikuti apa yang sudah tertuang dalam PBM. Perhatian mereka dengan mempertimbangkan berbagai kondisi sudah cukup baik, seperti

keseimbangan antara kondisi geografis dengan jumlah penduduk.

J. Tingkat toleransi antar umat beragama

Tingkat toleransi antar umat beragama, secara umum, responden tidak menolak pendirian rumah ibadah dan toleransi terhadap pemeluk agama lain dalam menjalankan ritual ibadatnya dalam lingkup yang relatif jauh. Namun mereka bersedia hidup bertetangga dengan pemeluk agama lain dalam lingkup yang lebih dekat. Dalam hal kerjasama antar umat beragama, mereka bersedia menghadiri undangan peringatan hari besar agama lain. dan bersedia mengundang pemeluk agama lain dalam peringatan hari besarnya. Meskipun sebenarnya kondisi ini dianggap belum cukup untuk mencapai KUB yang optimal.

Tentu saja kegiatan seperti ini perlu diteruskan untuk melakukan berbagai upaya komprehensif yang bertujuan mendekatkan jarak sosial antara umat beragama, sehingga derajat penerimaan terhadap keberadaan pemeluk agama lain, kebebasan dalam menjalankan ibadat agama lain, serta kerjasama optimal yang diwujudkan dalam tindakan saling bantu. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain seperti peningkatan kerjasama sosial antar umat beagama, peningkatan wawasan multikultural melalui pendidikan formal atau informal. Kondisi tersebut cukup membantu dalam mewujudkan kondisi KUB di OKU Timur dapat dilihat:

no	Objek	Skor		
		SS	S	TS
1	Toleransi terhadap pendirian rumah ibadah agama lain	28	20	-

2	Toleransi terhadap pemeluk agama lain dalam menjalankan ritual abadatnya	32	16	-
3	Toleransi dalam jarak fisik antar umat beragama	31	17	-
4	Tingkat kerjasama atar umat beragama dalam penyelenggaraan peringatan hari besar	28	20	-

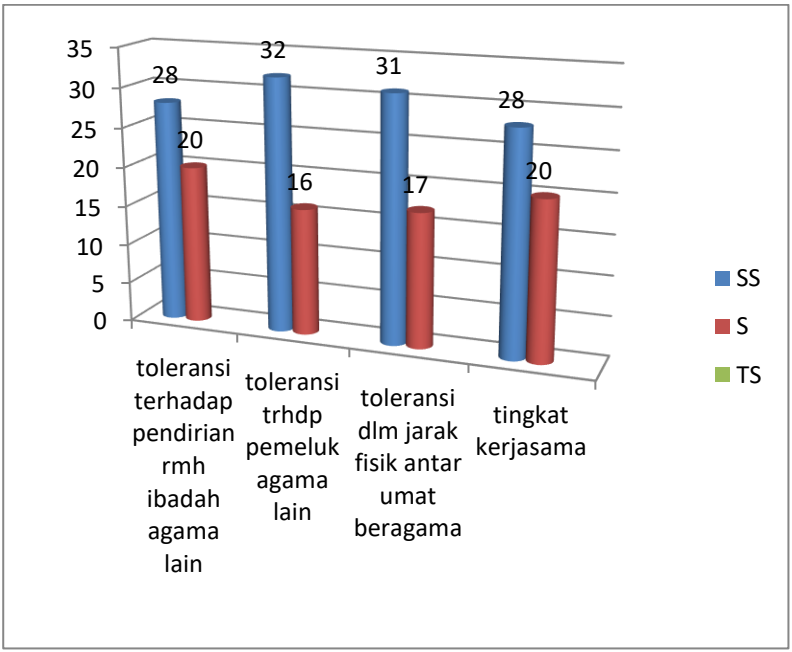

K. Kumunikasi Antar Umat Beragama di OKU Timur

Pola tindakan komunikatif akan terlihat dengan baik, kalau menghubungkan masing-masing karakteristik responden dengan persepsi dan sikap masyarakat terhadap penerapan PBM sebagai berikut:

1. Melihat hubungan jenis kelamin dengan persepsi, dari data yang di dapat dari hasil questioner dapat di lihat sebagai berikut

		Persepsi masyarakat thp penerapan PBM			
		Baik	Sedang	Tidak baik	
Jenis kelamin	Laki-laki	34	5	-	39
	Perempuan	8	1	-	9
		42	6		

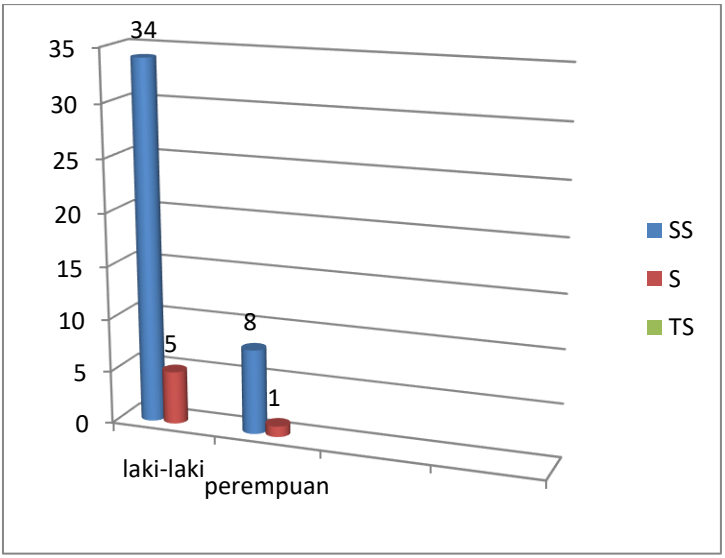

2. Melihat hubungan pekerjaan dengan persepsi, dari data yang di dapat dari hasil questioner dapat di lihat sebagai berikut:

		Persepsi masyarakat thp penerapan PBM			
		Baik	Sedang	Tidak baik	
Pekerjaan	PNS	24	3	-	27
	Swasta	19	2	-	21
		43	5		48

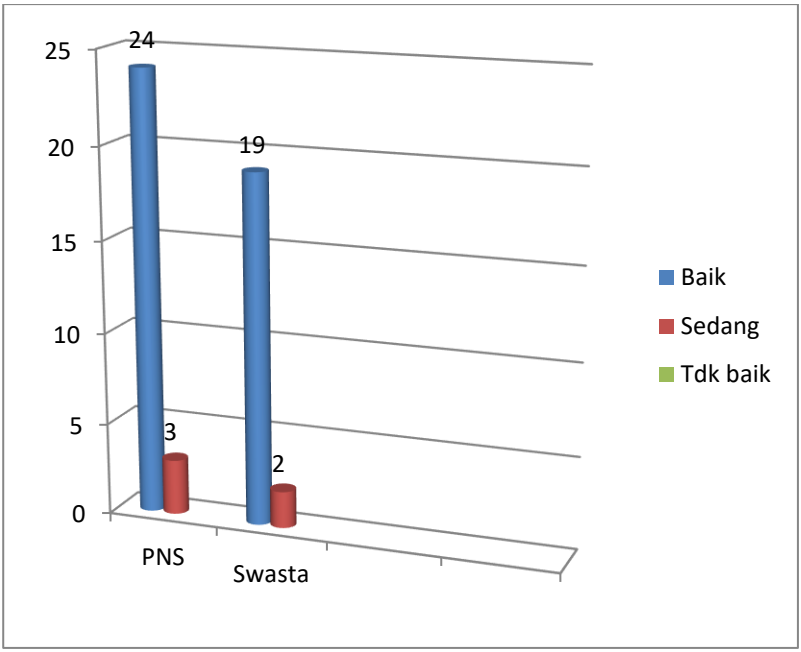

3. Melihat hubungan agama dengan persepsi, dari data yang di dapat dari hasil questioner dapat di lihat sebagai berikut:

		Persepsi masyarakat terhadap penerapan PBM			
		Baik	Sedang	Tidak baik	
Agama	Islam	42	2	-	44
	Kristen	1	-	-	1

	Katholik	1	-	-	1
	Hindu	1	-	-	1
	Budha	1	-	-	1
		46	2		48

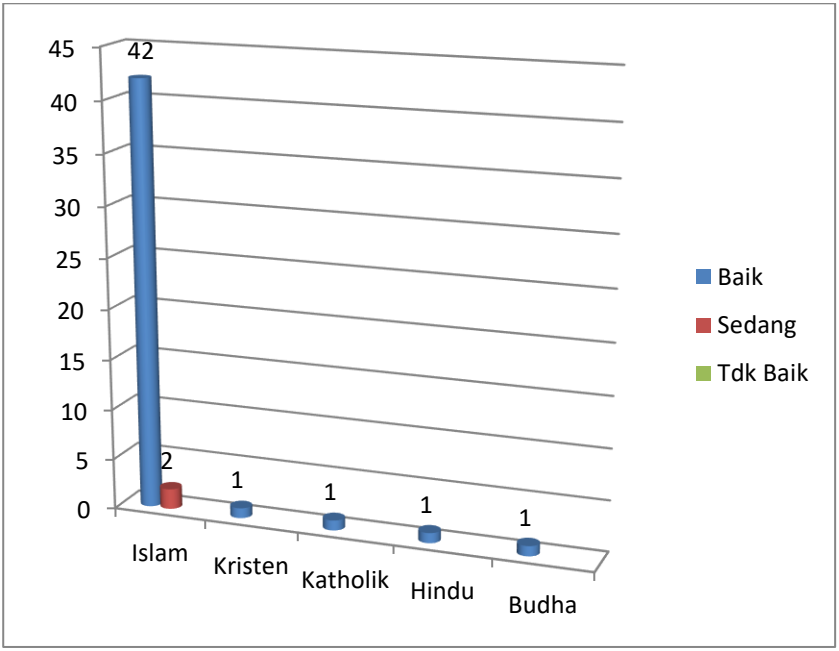

4. Melihat hubungan jenis kelamin dengan Sikap masyarakat terhadap penerapan PBM, dari data yang di dapat dari hasil questioner dapat di lihat sebagai berikut:

		Sikap masyarakat terhadap penerapan PBM			
		Baik	Sedang	Tidak baik	
Jenis kelamin	Laki-laki	31	8	-	39
	Perempuan	7	2	-	9
		38	10		48

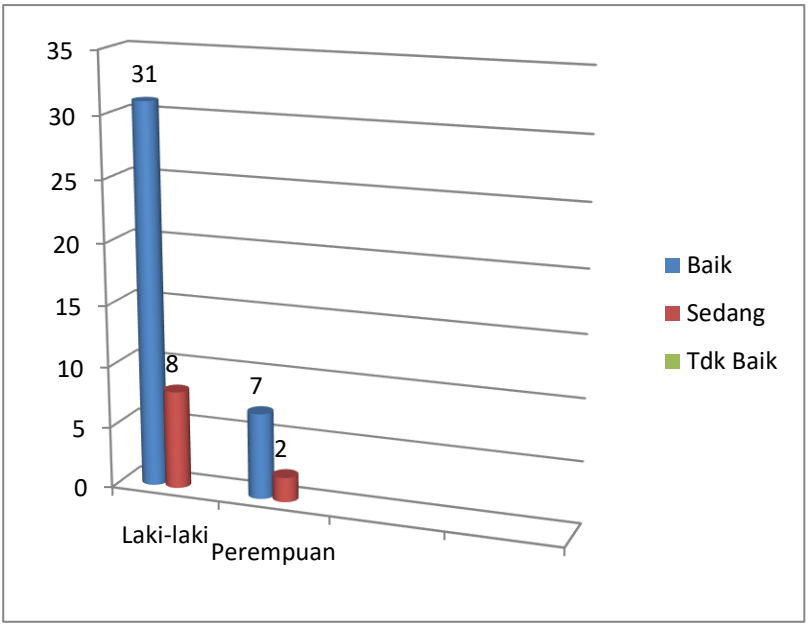

5. Melihat hubungan pekerjaan dengan Sikap, dari data yang di dapat dari hasil questioner dapat di lihat sebagai berikut

		Sikap masyarakat terhadap penerapan PBM			
		Baik	Sedang	Tidak baik	
Pekerjaan	PNS	22	5	-	27
	Swasta	18	3	-	21
		40	8		48

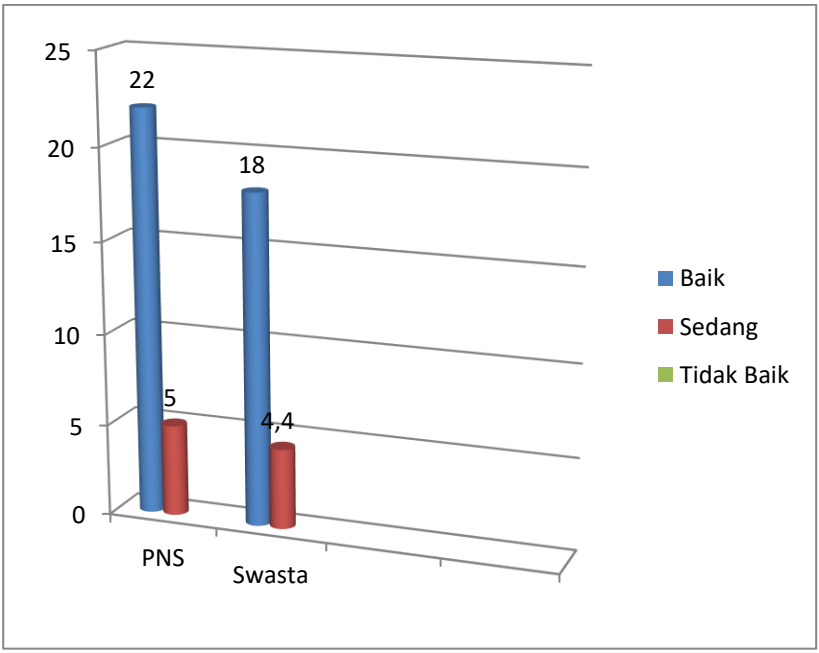

6. Melihat hubungan agama dengan Sikap, dari data yang di dapat dari hasil questioner dapat di lihat sebagai berikut

		Sikap masyarakat terhadap penerapan PBM			
		Baik	Sedang	Tidak baik	
Agama	Islam	44	-	-	44
	Kristen	1	-	-	1
	Katholik	1	-	-	1
	Hindu	1	-	-	1
	Budha	1	-	-	1
		48			48

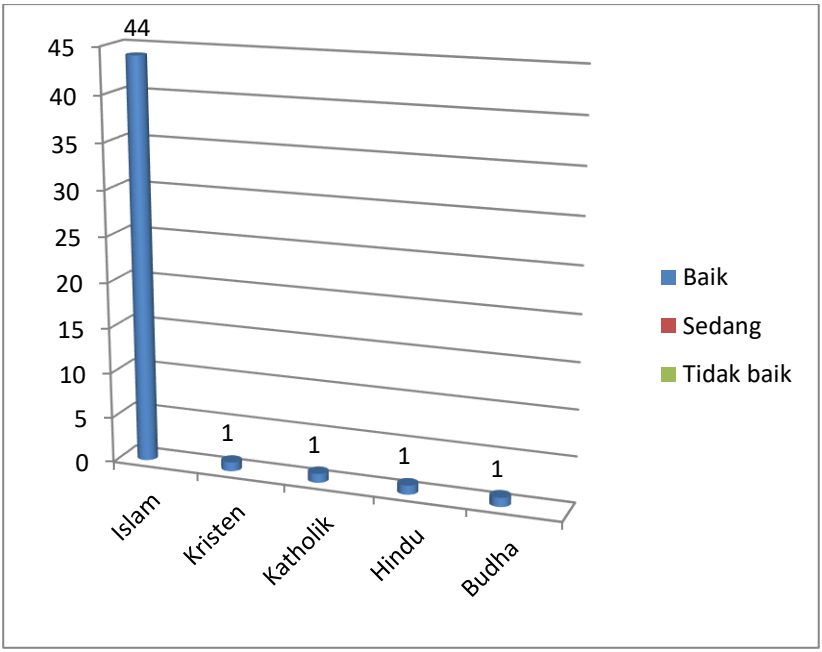

Hasil hubungan karakteristik responden dengan persepsi dan sikap terhadap Penerapan PBM di OKU Timur dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Hubungan antar perubah	Value (X	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
1	Jenis kelamin-persepsi	0,519	1	0,471

2	Pekerjaan—persepsi	0,032	1	0,858
3	Agama—persepsi	0,190	4	0,996
4	Jeniskelamin—Sikap	0,420	1	0,517
5	Pekerjaan—sikap	0,152	1	0,696
6	Agama—sikap	0,093	4	0,999

- Table nomor 1, Chi-Square test

  Nilai pearson chi-square sebesar 0,519 dan asymp. Significance (2-sided) = 0,471 atau 47,1 % > 1% berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara perbedaan jenis kelamin terhadap persepsi
- Table nomor 2, Chi-Square test

  Nilai pearson chi-square sebesar 0,032 dan asymp. Significance (2-sided) = 0,858 atau 85.8 % > 1% berarti tidak ada hubungan yang significan antara perbedaan pekerjaan

terhadap persepsi masyarakat terhadap penerapan PBM

- Table nomor 3, Chi-Square test

  Nilai pearson chi-square sebesar 0,190 dan asymp. Significance (2-sided) = 0,996 atau 99.6 % > 1% berarti tidak ada hubungan yang significan antara perbedaan Agama responden terhadap persepsi masyarakat terhadap penerapan PBM

- Table nomor 4, Chi-Square test

  Nilai pearson chi-square sebesar0,420 dan asymp. Significance (2-sided) = 0,517 atau 51.7 % > 1% berarti tidak ada hubungan yang significan antara perbedaan jenis kelamin terhadap sikap masyarakat terhadap penerapan PBM

- Table nomor 5, Chi-Square test

  Nilai pearson chi-square sebesar 0,152 dan asymp. Significance (2-sided) = 0,696 atau

69.6 % > 1% berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara perbedaan pekerjaan terhadap sikap masyarakat terhadap penerapan PBM

- Table nomor 6, Chi-Square test

  Nilai pearson chi-square sebesar 0,093 dan asymp. Significance (2-sided) = 0,999 atau 99.9 % > 1% berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara perbedaan agama responen terhadap sikap masyarakat terhadap penerapan PBM

Ketika mengamati jenis kelamin, pekerjaan, perbedaan agama, jika duhubungkan dengan persepsi dan sikap masyarakat atau responden terhadap pelaksanaan PBM didapatkan hasil yang cukup baik. Namun demikian, apabila dilihat dari besarnya korelasi (nilai kontingensi), jenis kelamin dan pekerjaan dengan pemahaman atau persepsi

berhubungan cukup erat dengan sikap seseorang dalam penerapan PBM. Implikasi dari hasil uji ini terhadap pelaksanaan PBM bahwa semua orang tanpa melihat karakteristik tersebut di atas dapat dijadikan sebagai subjek pelaksanaan PBM. Hal ini berkaitan erat dengan substansi tujuan PBM untuk mewujudkan dan memelihara KUB yang tentunya diperlukan oleh semua orang, baik itu laki-laki, perempuan; PNS, Swasta, atau pekerja kasar atau kantoran; yang mendapat pembinaan dari tokoh agamanya masing-masing ataupun pemerintah. Semua kelompok agama sudah mengetahui dengan baik tentang PBM, sehingga dalam pelaksanaannya di lapangan dapat berjalan sesuai keinginan.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa cukup baik pelaksanaan PBM di OKU Timur, masing-masing umat beragama sudah saling bisa memahami terhadap tuntunan peran masing-masing agama.

Kondisi riil misalnya terlihat dari pengamatan peneliti dalam organisasi masyarakat seperti yang dilakukan oleh PCNU OKU Timur dengan umat Kristen (GKI Gumawang) dalam aktifitas sehari-hari maupun formal, intensitas komunikasi atau dialog antar umat agama Islam dan Kristen di OKU Timur memiliki empat pola, berikut ini:

1. Pola Tindakan Komunikatif

Tindakan komunikatif (*communicative action*), seperti diungkapkan Habermas, tidak dapat dilepaskan dengan rasionalitas yang mendasarinya. Maka, dalam tindakan komunikatif Habermas menarik sebuah rasionalitas yang disebut rasionalitas komunikatif. Rasionalitas komunikatif ini berbeda dari rasionalitas instrumental. Tindakan komunikatif ini sungguh-sungguh rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Sebuah tindakan sungguh manjadi rasional, dalam arti tidak "ngawur", tidak semena-mena jika bisa dipertanggungjawabkan lewat jalan argumentasi atau forum diskusi"[44]

Tindakan komunikatif mengarah pada saling pengertian (*verstandingung*) antara pembicara dan pendengar. Dalam tindakan bahasa, misalnya. Ucapan yang ditujukan kepada seseorang tidak hanya bersifat memerintah untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mengambil bagian dalam proses komunikasi. Maksudnya, kalau dua orang berbicara, tindakan bicara itu berorientasi kepada saling pengertian atau kesepakatan mengenai kondisi-kondisi yang mengatur atau mengkoordinir tindakan-tindakan mereka supaya hidup bersama menjadi mungkin.

[44]Joao Piedade Inocencio, SJ., "Proses Dialog Interaksi" dalam Budi Susanto, *Teologi dan Praksis Komunikasi Post-modern*, hlm. 110.

Tindakan komunikatif memperlihatkan hubungan yang signifikan dalam mengikat pola tindakan yang lebih mengarah kepada interaksi yang sesungguhnya, tidak bersifat semu dan sementara. Kontinuitas hubungan seperti ini tergambar dari uangkapan salah seorang pengurus FKUB OKU Timur seperti disampaikan oleh Gus Afifi[45], bahwa hubungan yang dibangun oleh masyarakat lintas agama yang awalnya dimulai oleh para tokoh agama, kemudian dikuti oleh semua umat beragama, mereka melakukan komunikasi yang cukup intens, kemudian berusaha memahami perbedaan-perbedaan yang ada dalam pemahaman keagamaan masing-masing. Mereka juga mengemas perbedaan dalam

[45]Wawancara dengan Gus Afifi salah seorang pengurus FKUB juga Pengurus PCNU OKU Timur, dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2012

nuansa saling menghargai dan menghormati, yang berbeda biarlah berbeda, dengan tidak berusaha untuk menyamakannya, misalnya dalam persolan ketuhanan (tauhid), karena memang tidak akan pernah sama (mengalami titik temu), lalu kemudian mencari dan membangun hal-hal yang mungkin bisa dilakukan secara bersama-sama. Menurutnya, perbedaan diciptakan oleh Tuhan sang pencipta alam, dan oleh karenanya, harus dihormati. Tindakan komunikatif yang diperlihatkan oleh para tokoh agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha seperti ini kemudian dipahami dengan cukup baik oleh umat masing-masing agama.

Hal senada juga disampaikan oleh Pendeta, Romo Muji[46], bahwa Kehadiran nilai ketuhanan diperlukan dalam berhubungan dengan umat yang lain, oleh kerenanya, umat harus paham bahwa perbedaan datang dari tuhan, umat harus percaya dengan tuhan, bahwa dia memang mengendaki kita untuk belajar dari keinginan tuhan.

Pernyataan seperti ini juga disampaikan oleh tokoh umat Hindu, I Wayan Dhane[47], menurutnya keberagamaan masyarakat OKU Timur cukup tinggi, rasa saling menghargai antar sesama umat sudah dilakukan dengan baik sudah sejak lama. Kepada umat selalu disampaikan untuk saling menjaga, saling

[46]Wawancara dengan Romo Muji, dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2012

[47]Wawancara dengan I Wayan, dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2012

mengerti, saling memahami, dan saling memperkuat. Dengan begitu, OKU Timur akan selalu damai dan tenteram selalu dalam lindungannya. Yang penting umat bisa nyaman dalam melakukan ibadahnya, sedangkan berhubungan dengan umat agama lain merupakan perintah sang pencipta.

Pola pemahaman yang seperti ini kemudian di *organize* dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Oku Timur, seperti diuangkapkan oleh Asisten IV, Fathurrahman[48]. Menurutnya, pemerintah Kabupaten OKU Timur secara konsisten terus menerus menghimbau kepada seluruh umat beragama, terutama kepada para tokoh agama, supaya melakukan arahan tokoh agamanya masing-

[48]Wawancara dengan Asisten IV Oku Timur, Drs. M. Fathurrahman, M.M. dilakukan pada tanggal 25 Juli 2012

masing, saling menghormati dan menghargai. Pemerintah kabupaten senantiasa mengapresiasi segala bentuk keinginan masyarakat umat beragama dengan cara selalu menghadiri kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh semua agama yang ada di OKU Timur. Dengan demikian, ketertiban, kesepahaman, dan saling menghormati menjadi prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten.

Di samping, telah melakukan bebagai kegiatan yang berkaitan dengan kegamaan, pemerintah kabupaten juga telah melakukan kegiatan aksi untuk menjaga kerukunan antar suku-suku yang ada dengan meningkatkan tindakan komunikasi melalui penggunaan bahasa daerah yang ada di OKUT seperti melounching penggunaan bahasa Komering

yang menjadi bahasa mayoritas warga masyarakat OKUT. Bahasa Komering digunakan oleh pemerintah dan masyarakat sehari dalam seminggu yaitu pada hari Senin. Apresiasi pemerintah, tidak saja pada bahasa Komering, tetapi juga bahasa lain, seperti bahasa Jawa. Di bebarapa tempat yang dominan masyarakatnya berasal dari Jawa juga dipersilahkan untuk beberapa hari menggunakan bahasa Jawa, misalnya di daerah Belitang. Pemerintah, menurut Fathurrahman, tetap mengapresiasi semua keberagaman, tidak boleh ada warga masyarakat yang tidak bisa mengapresiasikan adat budayanya, asalkan bisa saling menghargai semua perbedaan yang ada, karena semuanya merupakan potensi kelebihan yang dimiliki oleh OKUT[49].

[49]Sriwijaya Post, Minggu, 8 Mei 2011

Dengan demikian, jenis tindakan yang berkaitan dengan orientasinya untuk mencapai tujuan tertentu, atau untuk mencapai saling pengertian. Dalam orientasi mencapai tujuan, tindakan tersebut bersifat instrumental bila untuk situasi tindakan yang bukan bersifat sosial, sedangkan menyangkut situasi tindakan yang bersifat sosial, maka tindakan tersebut bersifat strategis. Tindakan komunikatif berada dalam situasi tindakan yang bersifat sosial.

Dengan begitu, dialog antar agama sebagai suatu bentuk tindakan komunikasi, bisa dimasukkan ke dalam tindakan komunikatif yang berdasarkan rasionalitas komunikatif. Dengan demikian, dialog antar agama sebagai sebuah proses pengertian memperhitungkan situasi dan kondisi, seperti partner pembicara dengan klaim kebenaran agama yang diyakininya.

"Berhasil tidaknya koordinasi itu tergantung dari apakah partner bicara saya menerima atau menolak validitas pernyataan saya. Bahasa pada hakikatnya terarah pada saling pengertian antar manusia"[50]. Hanya dalam pola tindakan komunikatif bahasa diandaikan sebagai sebagai "medium lengkap saling pengertian (*verstandigung*) di mana pembicara dan pendengar, dari cakrawala dunia kehidupan mereka yang ditafsirkan, berhubungan dengan sesuatu yang sekaligus ada dalam dunia obyektif, sosial dan subyektif, untuk merundingkan rumus-rumus situasi bersama.[51]

Tindakan komunikatif selalu merupakan suatu tindakan berbicara dan karenanya

[50] Joao Piedade Inocencio, SJ., "Proses Dialog Interaksi", hlm. 109-110.

[51] Joao Piedade Inocencio, SJ., "Proses Dialog Interaksi", hlm. 108.

mengandaikan "medium bahasa di mana hubungan-hubungan pelaku dengan dunia tercermin sebagaimana adanya. Pengungkapan penghayatan iman dari masing-masing peserta yang terjadi dalam dialog antar agama, juga merupakan tindakan komunikatif yang mempergunakan bahasa. Karenanya, refleksi iman yang dikomunikasikan itu hanya terlaksana dalam tindakan berbicara menggunakan bahasa dengan memperhitungkan situasinya.

Tindakan komunikatif mengandaikan partisipasi pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi. Karenanya, pelaku-pelaku dalam dialog antar agama sungguh-sungguh lebih dari sekadar sebagai pengamat. Dalam dialog antar agama, tindakan komunikatif dengan berdasarkan rasionalitas komunikatif amat diperlukan karena dalam tindakan komunikasi inilah

tuntutan kesalingmengertian timbal balik itu dimungkinkan.

Habermas mengatakan bahwa medium bahasa tentu diandaikan dan digunakan juga oleh tiga pola tindakan lainnya yang dihasilkan oleh teori ilmu-ilmu sosial: pola teleologis, pola normatif, dan pola dramaturgis. Setiap pola mengimplikaikan hubungan tertentu dengan dunia.[52]

Ketiga pola tindakan: dramaturgis, normatif dan teleologis memiliki hubungan yang berat sebelah dengan bahasa. Dan, setiap model hanya mencakup satu jenis hubungan dengan dunia.

"Pola telelologis menganggap bahasa sebagai satu alat di anatara berbagai alat lainnya

[52] Joao Piedade Inocencio, SJ., "Proses Dialog Interaksi", hlm. 106.

untuk mencapai tujuan subyek dengan membuat orang lain memberikan opini yang sesuai dengan kepentingan pelaku sendiri. Pola normatif memandang bahasa sebagai sarana penyalur norma-norma. Dan, pola dramaturgis memperlakukan bahasa sebagai medium ekspresi diri"[53].

(2) Pola Tindakan Teleologis

Pola tindakan teleologis merupakan tindakan yang ditentukan oleh suatu tujuan, dan bahasa merupakan hanya sarana. Dalam dialog antar agama berdasarkan pola ini akan memerlihatkan partisipasi menjadikan dialog hanya sebagai sarana untuk tujuan tertentu, memengaruhi keyakinan partner dialog, dan

[53] Joao Piedade Inocencio, SJ., "Proses Dialog Interaksi", hlm. 108.

bukan dalam rangka mencapai saling pengertian timbal balik.

"Pola tindakan teleologis menyangkut tindakan subyek yang ditentukan oleh suatu tujuan untuk dicapai. Subyek berhubungan dengan obyek dalam rangka menguasainya secara teoritis maupun praktis. Di sini bahasa termasuk salah satu dari pelbagai sarana yang dipakai. Untuk memengaruhi partnernya membentuk opini atau maksud yang sesuai dengan kepentingan mereka".[54]

(3) Pola Tindakan Normatif

Pola tindakan normatif menunjuk pada norma-norma. Subyek memainkan perannya dalam interaksi dengan orang lain dengan

[54] Joao Piedade Inocencio, SJ., "Proses Dialog Interaksi", hlm. 106

bertindak sesuai dengan norma. Tindakan subyek di sini tidak diatur oleh sebuah tujuan yang ingin dicapai, melainkan oleh norma yang perlu dihormati, norma-norma yang diakui dalam sebuah kelompok sosial.

Dalam dialog antar agama terdapat norma-norma dari masing-masing agama yang dihormati, maupun norma yang disepakati bersama, atau nilai-nilai yang sifatnya universal. Begitu pun, terhadap norma agamanya sendiri, bagi peserta dialog berlaku klaim kesesuaian. Jadi, pola tindakan normatif, juga harus diperhatikan dalam dialog antar agama.

"Gambaran dunia yang dapat ditarik dari model ini ialah bahwa dunia bukan hanya dunia obyektif sebagaimana terimplikasi dalam model teleologis, melainkan dimensi sosial yang diatur oleh norma-norma. Pola ini mengandaikan bahasa

sebagai medium yang menyampaikan nilai-nilai budaya dan memberikan dasar konsensus bersama".[55]

(4) Pola Tindakan Dramaturgis

Pola tindakan dramaturgis pertama-tama tidak mencakup seorang pelaku terisolir, maupun anggota sebuah kelompok sosial tetapi para peserta sebuah interkasi di mana setiap seorang melihat orang lain sebagai publiknya dan dihadapannya ia menampilkan diri. Pelaku menimbulkan dalam publiknya gambaran dirinya sendiri dengan menguak diri, membuka kemungkinan bagi publik untuk memasuki lingkup pemikiran, suasan hati, kejujuran serta perasaannya yang paling pribadi. Ia ingin diterima seturut kesan yang ia cetak dalam publik.

[55] Joao Piedade Inocencio, SJ., "Proses Dialog Interaksi", hlm. 107

"Gambaran dunia yang diandaikan pola ini adalah sebuh *image* dirinya pada publik, pelaku mau tidak mau berhubungan dengan dunia subyektifnya sendiri bahwa ia sendirilah yang punya akses paling optimal terhadap dirinya sendiri. Pola ini mengandaikan bahasa sebagai sarana menampilkan diri di depan publik, sebuah alat untuk ekspresi diri. Bahasa disetarafkan dengan bentuk-bentuk ekspresi gaya bicara dan estetis"[56].

Pola tindakan dramaturgis dinyatakan oleh Habermas mengandung prinsip menghadirkan diri, atau proyeksi dari citra publik. Konsep tindakan dramaturgis ini pada pokoknya diinspirasikan dari Erving Goffman yang menggunakan permainan peran (*role games*) dalam

[56]Joao Piedade Inocencio, SJ., "Proses Dialog Interaksi", hlm. 107

teater untuk menerangi perjumpaan sosial. Istilah permainan peran di sini mengacu kepada tindakan yang berasal secara sosial dibandingkan pada tindakan yang bebas.

"Setiap tindakan dramaturgis adalah strategis secara implisit, bermaksud menimbulkan respon dari para pendengarnya. Di dalam teater kehidupan, hal itu diasumsikan sebagai suatu kondisi kepercayaan timbal balik di mana perananperanan yang dimainkan para aktor serupa dengan karakter mereka yang sebenarnya"[57]

Untuk dialog antar agama, pola tindakan dramaturgis dengan klaim keotentikan, menyarankan bahwa setiap penampilan

[57] David Ingram, *Habermas and the Dialectical Reason* (New Haven and London: Yale University Press, 1987), hlm. 31.

partisipan dialog hendaknya jujur sesuai dengan klaim kebenaran yang menjadi keyakinannya. Sikap dramaturgis ini hendaknya tidak menjadikan peserta dialog berakting yang hanya menampilkan konformitas atau sikap kompromi, kepura-puraan yang semu.

Interaksi yang terjadi atas dasar tindakan komunikatif tidaklah bebas nilai, melainkan memiliki basis nilai. Artinya, dengan mengatakan sesuatu bisa sekaligus menyatakan atau mengangkat sebuah pretensi akan validitas (*Geltungsanpriche*) kita. Kita berpretensi bahwa yang kita katakan itu sah. Habermas mengungkapkan tentang tiga pretensi validitas: kebenaran, kesesuaian, dan keotentikan. Masing-masing berkaitan dengan dunia obyektif, normatif, dan subyektif.

Validitas itu tercermin dalam model tindakan telelologis, normatif, dan dramaturgis.

Dalam teori tindakan komunikasinya, Habermas menyebutkan empat macam klaim.

(1) Klaim kebenaran (*truth*) jika sepakat mengenai dunia alamiah dan obyektif.
(2) Klaim kesesuain (*rightness*) jika sepakat mengenai pelaksanaan norma-norma dalam dunia sosial.
(3) Klaim otentisitas atau kejujuran (*sincerity*) jika sepakat mengenai kesesuaian antara dunia batiniah dan ekspresi individu.
(4) Klaim komprehensibilitas (*comprehensibility*) jika kita bisa menjelaskan macam-macam klaim itu dan mencapai kesepakatan atasnya.[58]

[58]ransisco Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. xii.

Habermas membedakan antara proses belajar yang refleksif. Yang pertama, mengambil di dalam konteks tindakan yang secara implisit timbul klaim validitas baik yang teoritis maupun praktis dan yang sudah semestinya diterima atau ditolak secara sederhana tanpa penjelasan diskursif. Yang kedua, mengambil tempat ketika klaim-klaim validitas itu dievaluasi secara diskursif. Karena perbincangan adalah metode yang layak untuk mengevaluasi klaimklaim itu, maka pembelajaran yang refleksif menyajikan suatu perkembangan yang mengatasi pembelajaran yang bukan refleksif.

Pembelajaran yang refleksif akhirnya memungkinkan terjadinya revolusi ilmu pengetahuan, mengingat revolusi ilmu pengetahuan adalah suatu perkembangan besar dari kekuatan-kekuatan produktif, yakni suatu

lingkungan pengetahuan yang dapat digunakan secara teknis "diangkat ke dalam proses pembelajaran yang refleksif".[59]

Universalitas klaim-klaim validitas yang inhern di dalam struktur pembicaraan mungkin dapat diterangkan dengan kerangka sistematik bahasa.Bahasa adalah sarana di mana pembicara dan pendengar menyatakan garis batas fundamental yang pasti. Garis batas subyek pada dirinya sendiri yang terdiri dari. (1) Suatu lingkungan yang diobyektivasikan di dalam sikap orang ketiga dari suatu pengamat. (2) Suatu lingkungan yang dikonfrontasikan kepada atau penyimpangan dalam sikap diri orang lain dari seorang peserta. (3) Subyektivitas dirinya sendiri yang ia wujudkan atau sembunyikan di dalam sikap orang pertama. (4) Sarana bahasa

[59] Julius Sensat, *Habermas and Marxism,* hlm. 47.

pada dirinya sendiri untuk menguasai realitas itu.[56] Tindakan komunikasi pada akhirnya tidak terlepas dari pembicaraan, dan subyek pembicara. Situasi pembicara tersebut juga melahirkan persyaratan tertentu yang dibutuhkan pembicara.

Ketika seseorang harus bertindak secara komunikatif di dalam penampilan sebuah tindakan pembicaraan, maka ia menumbuhkan klaim-klaim validitas universal dan menginginkan partisipasi di dalam sebuah proses untuk mencapai pengertian. Sebagai pembicara ia juga menuntut :

(a) Sesuatu pernyataan yang dapat dimengerti

(b) Memberikan (pendengar) sesuatu untuk mengerti

(c) Membuat dirinya dapat dimengerti, dan

(d) Siap untuk mengerti dengan orang lain.

Tindakan komunikatif atau kompetensi komunikasif dalam sebuah tindakan pembicaraan itu lewat tiga tahap komunikasi. (1) Tingkat interaksi yang diperantarai secara simbolik. (2) Tingkat pembicaraan yang dibedakan secara proposisi. (3) Tingkatan pembicara yang argumentatif.[57] Pada tingkat interaksi yang diperantarai secara sombolik, pembicaraan dan tindakan masih dalam kerangka tunggal dalam mode komunikasi yang imperatif. Pada tingkat pembicaraan yang dibedakan secara proposisi, untuk pertama kalinya tindakan dan pembicaraan dipisahkan. A dan B dapat menghubungkan sikap-sikap penampilan dengan sikap proposisional dari sebuah pengamat, masing-masing tidak hanya menerima perspektif yang lain, tetapi dapat saling menukar perspektif, entah sebagai pelalu atau pengamat.

Pada tingkat ketiga, pembicara yang argumentatif, klaim kesahihan yang kita kaitkan dengan pembicaraan dapat menjadi tematik yang luar biasa. Tiga tahap kompetensi komunikatif tersebut bisa untuk melihat apa yang terdapat pada pelaku dialog antar agama. Pada tahap pertama, para peserta berada dalam tataran kenyataan yang sama, berupaya saling memenuhi harapan. Selanjutnya, pada tahap kedua, tataran tindakan dan tuturan terpisah, peserta dapat berperan baik sebagai pelaku maupun pengamat, mengungkapkan aspirasinya atau sebagai pengamat yang tidak terlibat untuk mencapai pemahaman obyektif. Dan, pada tahap ketiga pernyataan-pernyataan mereka secara hipotesis diuji, misalnya dengan prinsip-prinisip universal.

Dengan demikian, harmonisasi yang terjadi pada masyarakat umat beragama di OKU Timur bisa terwujud tidak lepas dari intensitas dialog antar umat beragama, kemudian terdapat peran pemerintah yang cukup sunguh-sungguh dalam memperhatikan kebutuhan masing-masing umat beragama. Dengan begitu, tindakan komunikasi yang mendasari pola dialog antar umat beragama menemukan ruhnya yang berujung saling pengertian dan saling menghormati.

Evaluasi terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 tentang KUB yang dilaksanakan di OKU Timur telah sesuai harapan, sehingga kesepahaman dalam beragama dapat terwujud, masyarakat bisa terhindar dari kegiatan anarkisme atas nama agama. Masing-masing umat memerlukan sarana dan prasarana dalam beribadah, sehingga pembangunan rumah ibadah

menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari kehidupan keberagamaan, namun demikian, dalam pendiriannya harus pula disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Masyarakat umat beragama sangat memperhatikan organisasi seperti FKUB sebagai wadah mempertemukan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat masing-masing agama, senantiasa melakukan diskusi dalam dialog antar umat beragama, dan tindakan komunikatif menjadi alat yang ampuh dalam dialog antar umat beragama yang sering dilakukan di OKU Timur.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Tindakan komunikasi menjadi dasar suksesnya dialog antar masing-masing umat beragama telah berjalan cukup baik di OKU Timur, sehingga harmonisasi umat berama dapat berjalan sesuai dengan tujuan pemerintah mengeluarkan PBM tahun 2006. Aturan ini di OKU Timur dianggap cukup efektif sebagai alat ukur, atau rambu-rambu dalam menjalankan aktifitas keagamaan. Pesan menjaga kerukunan umat beragama dalam PBM telah pula dilaksanakan dengan baik oleh FKUB.

B. Rekomendasi

Strategi pelaksanaan PBM yang efektif dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama di OKU Timur adalah:

Pertama, justifikasi terhadap subjek hendaklah dilakukan seobjektif mungkin, dengan pola ini semua orang dianggap memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam ppelaksanaan PBM.

Kedua, perlu dilakukan terus sosialisasi tentang PBM baik melalui media alektronik maupun cetak, atau kegiatan nonformal di kelompok masing-masing umat beragama

Ketiga, merancang kurikulujm pendidikan multikulturalisme, supaya masing-masing umat beragama bisa memahami perbedaan

Keempat, perlu terus meningkatkan peran pemerintah (pemkab, kemenag) dalam rangka efektifitas peningkatan kesepahaman antar

pemeluk agama. Jika mungkin perlu menyediakan ketersediaan finansial yang kontinu dari pemkab OKU Timur, serta perlu memberdayakan SDM FKUB kabupaten agar mampu merancang dan malaksanakan program untuk pemeliharaan kerukunan umat beragama.

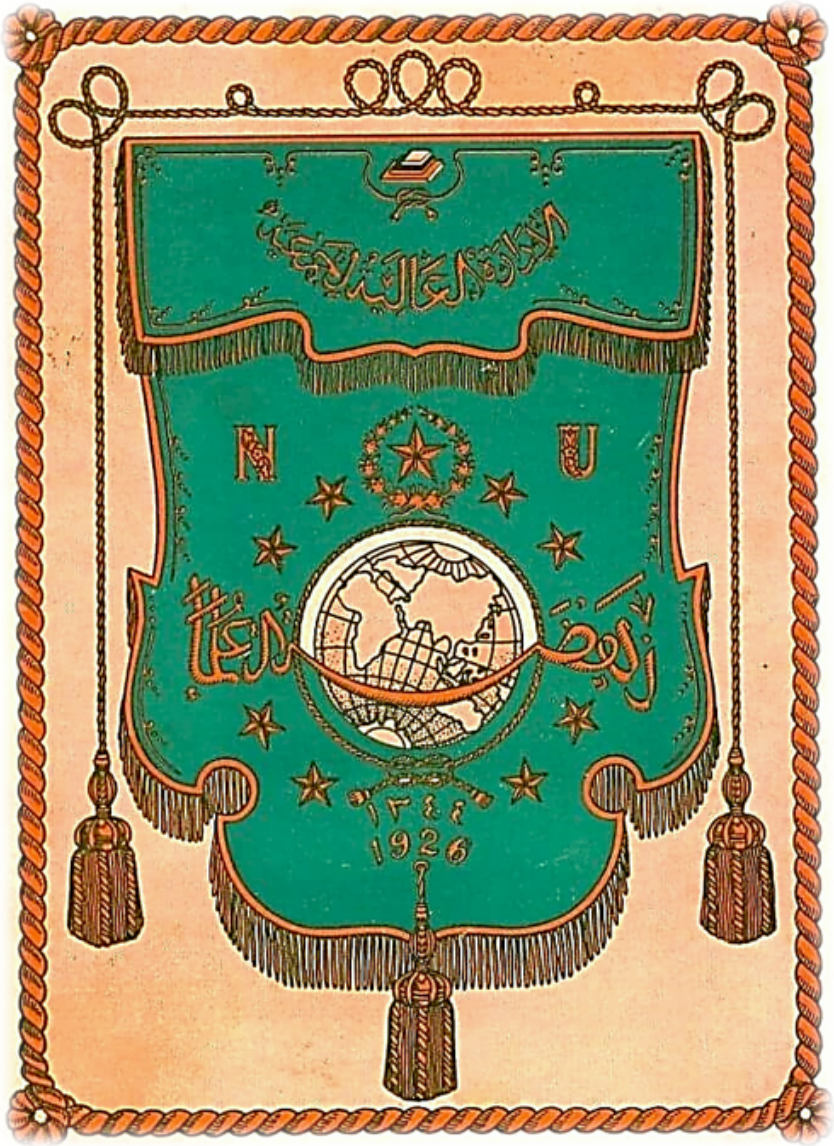
الاتحاد العالمية
N U
١٣٤٤
1926

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Mal An, at.al., Pemetaan Keagamaan di Lubuk Linggau, Tahun 2002, kerjasama IAIN Raden Fatah dengan Pemerintah Lubuk Linggau

Ali, Mukti, "Dialog dan Kerjasama Agama dalam Menanggulangi Kemiskinan" dalam Weinata Sairin (ed.), *Dialog Antar Umat Beragama: Membangun Pilar-pilar Keindonesiaan yang Kukuh* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994.

Aliroso, Eko, "Peta Kerukunan Umat Beragama Propinsi Bali". Dalam Tim Penulis, *Riuh di Beranda satu; Peta Kerukunan umat Beragama di Indonesia*, Seri II, Jakarta: Balitbang Depag RI, 2003

Aly, Salman, Sejarah Kesultanan Palembang, dalam Gajahnata dan Sri Edi Swasono, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan* (ed), Jakarta: UI Press, 1986

Arinze, Francis Cardinal, "Interreligious Dialogue and Harmony Today" dalam *Religiosa: Indonesian Jurnal of Religious Harmony*, vol. 1, No. 1, Agustus, Yogyakarta, 1995.

Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan *Sumsel dalam Angka 2010*, Tahun 2010

Banawiratna, J.B., "Theology of Religions" dalam *Religiosa: Indonesian Jurnal of Religious Harmony*, vol. 1, No. 2, April, Yogyakarta, 1995.

Giddens, Anthony, *Modernity and Identity, Self and Society in the Late Modern Age* Cambridge: Polity Press and Blackwell Publishers, 1993.

Habermas, Jürgen, *Communication and the Evolution of Society*, trans. Thomas McCarty, London: Heinemann, 1979

Idi, Abdullah, *Kerajaan Sriwijaya, Nilai-nilai Integrasi dan Implikasinya terhadap Kebijakan Otonomi Daerah*, Palembang: Unsri, 2001

Junaidi, Heri, Filsafat Wong Kito Galo, Penelitian IAIN Raden Fatah Tahun 2010

Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan* Jakarta: Gramedia, 1978

Koran Kompas, 5 Mei 1996

Kriege, David J., *The New Universalism: Foundation for a Global Theology* Maryknoll: Orbis Books, 1991

Moerdiono, *Makna Kerukunan Hidup Umat Beragama Menurut Tinjauan Paham Negara Kesatuan Republik Indonesia: Beberapa Pokok Pikiran*,

Jakarta, Sarasehan Sehari Majlis Ulama Indonesia, 5 Nopember 1966.

Mu'ti, Abdul, dan Fajar Riza ul-Haq, *Kristen-Muhammadiyah: Korvegensi Muslim dan Kristen dalam Pendidikan*, Jakarta: alWasat Publishing HouseI, cet, 1, 2009

Muchtar, Ibnu Hasan, "Peta Kerukunan umat Beragama Propinsi Nusa Tenggara Timur". Tim Penulis, *Riuh di Beranda satu; Peta Kerukunan umat Beragama di Indonesia*, Seri II Jakarta: Balitbang Depag RI, 2003

Mudzhar, Mohamad Atho, "Pluralisme, Pandangan Ideologis, dan Konflik Sosial Bernuansa Agama". Dalam Moh. Saleh Isre (ed), *Konflik etno Religius Indonesia Kontemporer,* Jakarta: Balitbang Depag RI, 2003

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* edisi IV, Yogyakarta: Rake Sarasin. 2000

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XIV, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001

Rahim, Husni, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam Studi Tentang Pejabat Agama masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, Jakarta: Logos, 1998

Ridwan, "Piagama Madinah dan Resolusi Konflik: Model Penataan Hubungan Antarumat Beragama". Dalam Puslitbang Kehidupan

Keagamaan Badan Libang dan Diklat Departemen Agama RI, *Harmoni*, Jurnal Multikultural dan Multireligius, volume VIII, Nomor 30, April-Juni 2009

Riyadi, M. Irfan, dan Basuki, *Membangun Inklusifisme Faham Kegamaan* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press), cet, 1, 2009

Rosyiah, Feryani Umi, *Kerukunan Hidup Antarumat Beragama: Studi tentang hubungan Antar Umat Beragama dan Komunitas Kristen di Komplek Waru Surabaya*, (Tesis) IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005

Santoso, Thomas, *Kekerasan Politik-Agama: Suatu Studi Konstruksi Sosial Tentang Perusakan Gereja di Situbondo, 1996* (Disertasi) Universitas Airlangga Surabaya, 2002

Suhardi, Asfons, *Kompas*, 25 Oktober 1986.

Sukidi, "Dari Pluraisme Agama Menuju Konvergensi Agama-agama" dalam *Kompas*, 17 Oktober 1998.

Taher Tarmizi, "Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia" dalam Mustoha (peny.), *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia* Jakarta: Departemen Agama RI, 1997

Yaqin, Ainul, *Pendidikan Multikultural Cross Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2007Hajjah Bainar,

et al, *Ilmu Sosial, Budaya dan Kealaman Dasar*, Jakarta: Jengki Satria, 2006

Zainuddin, M., *Relasi Islam-Kristen: konstruksi Sosial elit Agama tentang Pluralism dan Dialog antar umat Beragama di Malang*, (Disertasi) IAIN Suman Ampel, Surabaya, 2008

Zimmermann, Rolf, "Emancipation and Rationality: Foundational Problems in the Theories of Marx and Habermas", dalam *Ratio*, XXXVI, 1984.

PANCASILA

KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PERSATUAN INDONESIA

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG

Keragaman suku, budaya, dan agama di Sumatera Selatan terjadi di setiap kabupanten kota dan akan sangat kentara, ketika melihat kabupaten OKU Timur sebagai sebuah sampel. Bahkan "mungkin" kabupaten ini kelak bisa disebut sebagai refrensentasi atau miniaturnya keberagaman bangsa Indonesia. Di beberapa tempat di OKU Timur, bahkan terdapat gereja yang dikelilingi oleh pesantren dan beberapa tempat ibadah lainnya seperti masjid dan mushalla.

SYARIAH
IAIN RADEN FATAH PRESS